

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI



Oleh:

OKTANA YUDHA SAKTI

NIM: 11520032

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

OKTANA YUDHA SAKTI
NIM: 11520032

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SKRIPSI

Oleh :

OKTANA YUDHA SAKTI

NIM: 11520032

Telah Disetujui, 2 November 2015
Dosen Pembimbing,

Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA
NIP. 19791002 201502 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SKRIPSI

Oleh :

OKTANA YUDHA SAKTI
NIM: 11520032

Telah Disetujui, 2 November 2015
Dosen Pembimbing,



Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA
NIP. 19791002 201502 2 001



Telah Disetujui:
Ketua Jurusan,

Nasik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SKRIPSI

Oleh :

OKTANA YUDHA SAKTI

NIM: 11520032

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 13 Nopember 2015

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji I (Ketua Penguji)
Yuniarti Hidayah SP, SE., M.Bus : ()
NIP. 19760617 200801 2 020
2. Penguji II (Sekretaris/Pembimbing)
Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA : ()
NIP. 19791002 201502 2 001
3. Penguji III (Penguji Utama)
Sri Andriani, SE., M.Si : ()
NIP. 19750313 200912 2 001

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SKRIPSI

Oleh :

OKTANA YUDHA SAKTI

NIM: 11520032

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 13 Nopember 2015

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji I (Ketua Penguji)
Yuniarti Hidayah SP, SE., M.Bus., Ak., CA : ()
NIP. 19760617 200801 2 020
2. Penguji II (Sekretaris/Pembimbing)
Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA : ()
NIP. 19791002 201502 2 001
3. Penguji III (Penguji Utama)
Sri Andriani, SE., M.Si : ()
NIP. 19750313 200912 2 001

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,



Nahik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

PERUBAHAN JUDUL

Menyatakan bahwa dalam revisi dilakukan perubahan judul untuk meningkatkan kualitas penelitian. Berdasarkan rekomendasi dari dosen pembimbing perubahan judul adalah sebagai berikut:

JUDUL AWAL	JUDUL BARU
Akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

Mengetahui:

Kepala Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Malang, 2 November 2015
Dosen Pembimbing,



Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA
NIP. 19791002 201502 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktana Yudha Sakti
NIM : 11520032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK”

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 2 November 2015
Hormat Saya,

Oktana Yudha Sakti
NIM : 11520032

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktana Yudha Sakti
NIM : 11520032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK”

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 2 November 2015

Hormat Saya,



Oktana Yudha Sakti
NIM : 11520032

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktana Yudha Sakti

NIM : 11520032

Jurusan / Prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap

Tesis, Disertasi : Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah
Kabupaten Trenggalek

~~Mengizinkan~~/tidak mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi, ~~tesis, disertasi~~) dipublikasikan melalui website perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Secara Keseluruhan (full teks).

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Nopember 2015

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

(Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA)
NIP. 19791002 201503 2 001

(Oktana Yudha Sakti)
NIM. 11520032

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktana Yudha Sakti
NIM : 11520032
Jurusan / Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap
Tesis, Disertasi : Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah
Kabupaten Trenggalek

~~Mengizinkan~~/tidak mengizinkan jika karya ilmiah saya (skripsi, ~~tesis, disertasi~~) dipublikasikan melalui website perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Secara Keseluruhan (full teks).

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Nopember 2015

Dosen Pembimbing



(Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA)
NIP. 19791002 201503 2 001

Mahasiswa



(Oktana Yudha Sakti)
NIM. 11520032

HALAMAN PESEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas ridho dan kekuasaanmu telah memberikan kekuatan, ilmu, semangat dan ketabahan. Atas karunia dan kemudahan yang diberikan akhirnya skripsi yang saya buat ini guna menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh perkuliahan strata satu (S1) dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW

Dipersembahkan karya ini utamanya kepada kedua orang tua, ibu Kasiati, ibu yang telah melahirkan dan merawat serta yang selalu membimbing anaknya untuk menjadi anak yang lebih baik. Bapak Sutarto sebagai bapak yang gigih dalam mencari biaya untuk anaknya melanjutkan pendidikan, tak mengenal waktu siang malam dalam bekerja. Doa beliau berdua adalah harapan anaknya karena doa beliau adalah kekuatan dari anak-anaknya untuk mencapai segala angan dan cita-cita anaknya. Jasa yang besar beliau berdua tak akan bisa dibalas dengan apapun tetapi harapannya hanyalah kesuksesan anaknya. Semoga tercapai atas doamu..... amin!!!

Anggun C terimakasih atas peran sodara perempuanku yang satu ini semoga sama-sama bisa membanggakan kedua orang tua, persembahkan kecil ini hanya bisa ditulis lewat karya kecil ini.. ☺

Keluarga besar Mbah Kusni (Alm) dan Mbah Nangin (Alm) terimakasih doa, materi dan semuanya untuk membatu kuliah saya..terimakasih dan ponakan panjenengan sampun lulus dan hanya karya ini yang bisa saya persembahkan.. ☺

Sahabat RT 04 Desa Banaran sahabat adu neker, Sogol, Sedok, Bonjol, Jatso, Bondet, Lita (konco cilikan),Momon, Etek dan lainnya yang tak tersebut terimakasih inspirasi, semangat dan doa untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih.....!!!! ☺

Konco SD banaran, Elsa, Kadal, Ida, Ika, Yongki, Pandu, lan lialiane...
Konco SMP, Bayu, Ninda, Reza, Sukur, Andik, Gento, lan lialiane...
Konco SMA, Ridwan, Dwek, Apip, Bagus, Bambang, Agus, Ipul, Ovi, Panggul, Gio, Eka, Andre, Anggun, Caca, Rena, Ayu Papung, Yeyen, Widya, Bangun, Rosa, dan lain-lain terimakasih suport dan doa untuk bisa saya menyelesaikan karya ini.....semoga kalian selalu kompak broo.... ☺

Warung besar Makjah, Tiki-taka kuno-kini, Restu atika, Pak met ... sebagai inspirasi kepenatan saat merangkai karya ini... terimakasih ☺

Semua sahabat, Trenggalek kepo (Fander, Endok dan Mami keti, Wismo, Jete, Spek, Nanza, Endra, Dhendy, Beny, Dje, Kamso, Mamat, dll). Trenggalek cie (Mbah di, Tole, Aang, Takim, Robet, Dio, Kace, dll). Cah Buluagung (Kadal, Edeh, Kuntet, Tebo, Priyo, Redha, Purwito dll). Konco dolan (Oky, Aang, Hary, Bendol, Pijer, dll). Keluarga angel masuk KK (Prapteng, Japrak, Gombloh, Panggah, Ondeng dll). Konco Kos (Dian, Agus, Nabil, Bli, Nizar, Mbah, Hendra, Ifan, Fadli). Saben Aran (Rimby, Esa, Nikmah Oseme, Dani, Yeni, Popy, Rida, Rony, Alim, Ipul, Rendy Parley, Najib, dll). Terimakasih bantuan doa, suport, motivasi, dan bimbingan semoga kita-kita menjadi orang yang bermanfaat bagi Indonesia karena garda bangsa adalah kita, Pemuda Indonesia...!!!!

Terimakasih tidak lupa kepada guru berkat jasanya saya bisa baca dan tulis, ilmu dan doa yang beliau berikan. Terimakasih Jasamu Pahlawan Pendidikan

Terimakasih kepada dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkat jasa dan doa anak didikmu telah bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik, hanya ini yang bisa saya persembahkan. Terimakasih Jasamu Pahlawan Pendidikan

Angkatan 2011 Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih kerjasamanya sampai saya bisa menyelesaikan tugas ini semoga kerjasama dan persodaraan tidak akan putus saat kita kembali ke masyarakat, semoga sukses!!!

Malang, 2 Nopember 2015
Hormat Saya,

Oktana Yudha Sakti

MOTTO

“Bicaralah selagi kita percaya, berakhsilah selagi kita mampu, dan
gayuh semangat untuk menjalankan keduanya, mari merubah
Indonesia lebih baik”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, ibu, adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan sprirituil.

7. Sahabat-sahabat dari Sekutu Kos yaitu Nabil, Dian, Hendra, Nizar, Hafid, Tony, Amar, Iffan, Nasrudin, Agus serta beberapa tamu yang sering main ke tempat kos tercinta ini yaitu Dani, Saipul, Puguh, Wildan, Alim, Najib dan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, terimakasih atas kebersamaan dan canda tawa yang selalu tercipta baik siang dan malam. Saya tidak akan melupakan segala kenangan ini dan semoga kebersamaan ini tidak akan mudah terputus hingga akhir hayat.
8. Semua teman yang saya kenal semenjak belajar di SDN 1 Banaran sampai dengan di SMAN 1 Karanganyar yang telah mengisi hidupku semenjak belajar menulis, dan berjuang dalam menuntut ilmu sampai saya bisa menuliskan lembaran skripsi ini.
9. Dulur seangkatan Akuntansi UIN Maliki Malang khususnya yang berjuang bersama dalam menuntut ilmu di kampus tercinta ini dan selalu menghibur ketika berada di dalam maupun di luar kelas dan memberikan bantuan untuk memahami masalah dalam pengetahuan.
10. Semua saudara/i, teman, sahabat, dan siapapun yang Nampak dan yang tak Nampak di penglihatan tapi doa dan dukungan semangatnya selalu mengalir buatku.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robba 'Alamin.

Malang, 2 Nopember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERUBAHAN JUDUL	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat	7
1.3.1. Tujuan	7
1.3.2. Manfaat	7
1.4. Batasan Masalah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Kajian Teoritis	13
2.2.1. Akuntabilitas	13
2.2.2. Transparansi	16
2.2.3. Pengawasan	18
2.2.4. Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	24
2.2.5. Kajian Teori Menurut Perspektif Islam	26
2.3. Kerangka Konseptual	28
2.4. Hipotesis	29
2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	29
2.4.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	30
2.4.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Secara Simultan Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
3.2. Lokasi Penelitian	32
3.3. Populasi dan Sampel	32
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	33
3.5. Metode Pengambilan Data	33
3.6. Variabel Operasional Variabel	34
3.7. Analisa Data	35
3.7.1. Uji Kualitas Data	35

3.7.1.1. Uji Validasi	35
3.7.1.2. Uji Reliabilitas	36
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	36
3.7.2.1. Multikolinearitas	36
3.7.2.2. Heteroskedastisitas	37
3.7.2.3. Normalitas	38
3.7.2.4. Autokorelasi	39
3.7.3. Pengujian Hipotesis	39
3.7.3.1. Uji F (<i>F-test</i>)	39
3.7.3.2. Uji t (<i>t-test</i>)	40

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisi Data	41
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.1.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	41
4.1.1.2. DPRD II Kabupaten Trenggalek	43
4.1.1.3. Data Responden	45
4.1.1.4. Karakter Responden	46
4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian	50
4.1.3. Uji Kualitas Data	60
4.1.3.1. Uji Validitas	60
4.1.3.2. Uji Reabilitas	64
4.1.4. Uji Asumsi Klasik	65
4.1.4.1. Uji Multikolinearitas.....	65
4.1.4.2. Uji Heteroskedastisitas	66
4.1.4.3. Uji Normalitas.....	68
4.1.4.2. Uji Autokorelasi.....	70
4.1.5. Uji Regresi Berganda	70
4.1.6. Uji Hipotesis	72
4.1.6.1. Uji F (<i>F-Test</i>)	72
4.1.6.2. Uji t (<i>t-Test</i>)	74
4.2. Pembahasan	75
4.2.1. Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek	76
4.2.2. Mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek	78
4.2.3. Mengetahui Pengaruh Pengawasan dan Transparansi Secara Simultan Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Keterbatasan	83
DAFTAR PUSTAKA	84

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.1.1	Penelitian Terdahulu (Lanjutan)	10
Tabel 2.1.2	Penelitian Terdahulu (Lanjutan)	11
Tabel 2.1.3	Penelitian Terdahulu (Lanjutan)	12
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.1.1	Definisi Operasional Variabel (Lanjutan).....	35
Tabel 4.1	Pengumpulan Data	45
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	46
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Fraksi	48
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Komisi	49
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Kualifikasi Akademik.....	50
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel Akuntabilitas.....	51
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel Transparansi.....	54
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel Pengawasan.....	57
Tabel 4.10	Uji Validitas Akuntabilitas Awal.....	60
Tabel 4.11	Uji Validitas Transparansi Awal.....	61
Tabel 4.12	Uji Validitas Pengawasan Awal.....	61
Tabel 4.13	Uji Validitas Akuntabilitas Lanjutan	62
Tabel 4.14	Uji Validitas Pengawasan Lanjutan	63
Tabel 4.15	Uji Validitas Akuntabilitas	64
Tabel 4.16	Uji Reabilitas.....	65
Tabel 4.17	Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.18	Uji Heteroskedastisitas.....	67
Tabel 4.19	Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.20	Uji Regresi	71
Tabel 4.21	Uji F	73
Tabel 4.21	Uji T	74
Tabel 4.22	Uji Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Hasil Heteroskedastisitas.....	67
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	69
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Probability.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Kuisisioner Penelitian
LAMPIRAN II	Hasil Olah Data SPSS
LAMPIRAN III	Data DPRD II Kabupaten Trenggalek
LAMPIRAN IV	Surat Ijin Penelitian
LAMPIRAN V	Bukti Konsultasi
LAMPIRAN VI	Biodata Peneliti



ABSTRACT

Sakti, Yudha Oktana. 2015, Thesis. Title: "THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT SUPERVISION IN TRENGGALEK DISTRICT GOVERNMENT "

Advisor : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA

Keywords : Accountability, Transparency, Supervision, Regional Financial Management, DPRD (Regional *People's Representative Council*), Local Government

This study aims to determine the effect of accountability and transparency of the regional financial management supervision in Trenggalek District government. Accountability is a system of government responsibility for their main duties and functions. Transparency is built based on the framework of the freedom of information flow. Supervision is a pattern to provide an understanding and awareness to avoid errors and irregularities.

The method used is quantitative using all members of DPRD II in Trenggalek District (45 people) as the sample. It employs survey method. DPRD has a legislative function, budgeting, and supervision. In the research, DPRD plays a role in the supervision of Local Government II work program in Trenggalek District.

The results of this study shows the accountability variable is t_{count} (0,257) $< t_{table}$ (2,052) or Sig T $> 5\%$ (0,799 $> 0,05$). Therefore, H_a is accepted and H_o is rejected which means that, partially, there is no influence between accountability and supervision of regional financial management (APBD). The transparency variable is t_{count} (0,517) $< t_{table}$ (2,052) or Sig T $> 5\%$ (0,609 $> 0,05$). Thus, H_a is accepted and H_o is rejected which means, partially, there is no influence between accountability and regional financial management supervision (APBD). Meanwhile, the F test points out that F_{count} 0,139 $< F_{table}$ 4,21 or Sig F $> 5\%$ (0,817 $> 0,05$). The result declares that accountability and transparency does not affect the regional financial management supervision (APBD) simultaneously. It is concluded that other variables have great influence in this research. For future research, accountability and transparency indicator need to be added to clarify the results in a better way.

مستخلص البحث

أوكتا يودي ساكتي، ٢٠١٥، تأثير المساءلة والشفافية على مراقبة إدارة المالية المحلية في المنطقة عند الحكومة المحلية ترانغاليك، البحث. المشرف : د. دوي سوليسيتاني الماجستير.

الكلمات المفتاحية : المساءلة، الشفافية، المراقبة، إدارة المالية في المنطقة، الحكومة المحلية.

يهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير المساءلة و الشفافية على إشراف إدارة المالية في المنطقة عند الحكومة المحلية ترانغاليك. المساءلة هي النظام الذي يبين فيها عمل الحكومة المحلية لواجباتها ومهامها. بنيت الشفافية على إطار حرية نشر المعلومات. وأما المراقبة فهو نمط يعطيه الفهم والوعي كي لاتقع على الأخطاء والمخالفات.

يستخدم الباحث المنهج الكيفي، وعينة البحث هي جميع أعضاء برلمان المحلي ترانغاليك، وعددهم ٤٥ شخصا بطريقة الزيارة. للبرلمان وظيفة تشريعية، تصميم الميزانية، والمراقبة. في هذا البحث فإن برلمان المحلي يلعب دورا في مراقبة خطة العمل لدي الحكومة المحلية ترانغاليك.

بناء على نتائج البحث المحصولة فإن متغير المساءلة هو ت. هـ (٠،٢٥٧) > ت. ت (٢،٠٥٢) أو سيغ ت < ٥% (٠،٧٩٩ < ٠،٠٥). لذلك هـ . و (مقبول) و هـ. أ (مرفوض)، بمعنى جزئي أنه ليس فيه تأثير المساءلة على مراقبة إدارة المالية المحلية. فأما متغير الشفافية هو ت. هـ (٠،٥١٧) > ت. ت (٢،٠٥٢) أو سيغ ت < ٥% (٠،٦٠٩ < ٠،٠٥). لذلك هـ . و (مقبول) و هـ. أ (مرفوض)، بمعنى جزئي أنه ليس فيه تأثير الشفافية على مراقبة إدارة المالية المحلية. ويحصل إختبار ف : ف. هـ (٠،١٣٩) > ف. ت (٤،٢١) أو سيغ ف < ٥% (٠،٨١٧ < ٠،٠٥). لذلك في نفس الوقت فإنهما لاتأثرا على مراقبة إدارة المالية المحلية. يستخلص الباحث من تلك النتائج أنّ المتغير الآخر أكبر تأثيرا في هذا البحث. ويحتاج البحث المستقبل لإضافة مؤشر المساءلة والشفافية لتوضيح نتائجه.

ABSTRAK

Oktana Yudha Sakti. 2015, SKRIPSI. Judul: "PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK"

Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Daerah, DPRD, Pemerintah Daerah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Akuntabilitas adalah sistem pertanggung jawaban pemerintah terhadap tugas pokok dan fungsinya. Transparansi dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Pengawasan adalah pola untuk memberikan pemahaman dan kesadaran sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan.

Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel yang digunakan adalah seluruh anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek dengan jumlah 45 orang dengan menggunakan metode survei. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada penelitian DPRD berperan dalam pengawasan program kerja Pemerintah Daerah II Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh variabel akuntabilitas, $t_{hitung} (0,257) < t_{tabel} (2,052)$ atau $Sig T > 5\% (0,799 > 0,05)$. Oleh karena itu, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Untuk variabel transparansi, $t_{hitung} (0,517) < t_{tabel} (2,052)$ atau $Sig T > 5\% (0,609 > 0,05)$. Oleh karena itu, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Sedangkan uji F diperoleh bahwa, $F_{hitung} 0,139 < F_{tabel} 4,21$ atau $Sig F > 5\% (0,817 > 0,05)$. Hasilnya akuntabilitas dan transparansi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Hasil yang telah dipaparkan ditarik kesimpulan bahwasanya variabel lain sangat mempengaruhi dari penelitian ini. Penelitian selanjutnya perlu ditambahkan indikator akuntabilitas dan transparansi untuk lebih memperjelas hasil.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi dalam domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keleluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berbeda didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Menurut Mardiasmo (2002: 2) istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Dalam memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau penggunaan jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas serta persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2006:2).

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Efektifitas dalam pengelolaan APBD tergantung dari bagaimana pemerintah daerah menjalankan dari peran pemerintah tersebut, disebutkan pada UU-RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 1 ayat 32 bahwasanya “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”, sehingga pemerintah daerah dapat leluasa dalam mengelola keuangan daerahnya.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Sedangkan menurut Husen (2005) , akuntabilitas sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik (*agencies*) mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk dapat mewujudkannya, bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik didalam mendefinisikan dan memmanage harapan-harapan publik, tapi juga tergantung pada kemampuan publik dalam melakukan kontrol atas harapan-harapan yang telah didefinisikan, baik yang dilakukan oleh lembaga kontrol resmi maupun oleh para

politisi dan masyarakat. Karena, birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel jika mereka dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik.

Transparansi (*transparency*) harus dibangun dalam rangkan kebebasan aliran informasi (Sedarmayanti:2004). Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang transparan kepada rakyatnya. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya (Mihradi, 2011:). Keterbukaan hendaknya memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengetahui kinerja dari program-program pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dari pengelolaan APBD.

Menurut Makmur (2011:176) pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Pengawasan itu sendiri memiliki peran besar dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah tidak akan bisa sewenang-wenang dalam mengalokasikan keuangan daerah tersebut, dari dampak yang timbul maka pemerintah daerah mau tidak mau harus bekerja sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi pemerintah daerah tersebut dalam mengemban amanah pengelolaan keuangan daerah.

Halim (2002:146) berpendapat, pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, masyarakat dapat melaksanakan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Banyak penelitian dan pendapat yang menyatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam peningkatan kinerja pemerintah yang baik dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir (2007) mengatakan bahwa implementasi dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat sehingga pemerintah daerah akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan pengawasan kinerja pemerintahan dengan baik. Coryanata (2007) berpendapat bahwa akuntabilitas dan transparansi menunjukkan jika pengawasan berpengaruh signifikan. Novatiani, & Lestari (2014) menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dengan adanya hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan pengujian kembali untuk meninjau hasil penelitian dalam mengidentifikasi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan

pengelolaan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Trenggalek.

Dilakukan penelitian pemerintah Kabupaten Trenggalek dikarenakan peneliti memiliki rasa ingin tahu tentang akuntabilitas, transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Trenggalek karena peneliti melihat dari data BPS tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Trenggalek mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 5,83 persen menjadi 4,41 persen ditahun 2014. Akan tetapi hitungan indeks pembangunan manusia di trenggalek tergolong baik karena lebih besar dari indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur sebesar 73,98 persen sedang di Trenggalek sebesar 74,73 persen. Sedangkan dari pendapatan perkapita sendiri di Trenggalek tergolong masih yaitu sebesar Rp 17,93 juta perkapita.

Pendapatan dan belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek di tahun 2014 terdapat tiga sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Ketiga pendapatan tersebut sebesar 1,4 trilyun di tahun 2014. Belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek di tahun 2014 sebesar 1,3 trilyun.

Usaha pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti tanggung jawab yang tinggi dan kemudahan dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Trenggalek merupakan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Akses publik dalam mengetahui jalanya pemerintahan sehingga dalam setiap kebijakan pemerintah didasarkan pada

kepentingan publik sebab publik merupakan elemen terbesar dalam setiap tujuan dari pemerintahan yang berjalan efektif dan kondusif.

Perbedaan penelitian ini dengan yang lain yaitu berdasarkan responden yang digunakan adalah seluruh anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek dengan jumlah 45 orang. Berdasarkan keseluruhan anggota dewan tidak secara keseluruhan adalah badan anggaran. Variabel yang digunakan hanya merujuk pada masalah akuntabilitas, transparansi dan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah yang disampaikan diatas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

- Apakah Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

1.3.2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi DPRD dan Pemerintah Daerah, DPRD memiliki 3 fungsi menurut kegunaannya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagai fungsi pengawasan DPRD memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan daerah supaya dalam roda pemerintahan daerah tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan. Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maka Pemerintah Daerah harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku, menjalankan fungsi pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kedua lembaga tersebut harus bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan kemakmuran rakyat.

2. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD.
3. Bagi akademisi, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP), serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini peneliti buat dengan batasan masalah yang akan dibahas yaitu masalah akuntabilitas dan transparansi hanya mencakup pada akuntabilitas pemerintah dan transparansi pemerintah. Fokus penelitian ini adalah pada pengawasan yang dilakukan terhadap Pemerintah Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai *checks and balances*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa sumber.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wayudi, Isa (2007), Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	Telaah pertanggung jawaban publik, Metode kuantitatif	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap pengawasan oleh DPRD.

Sumber; data diolah 2015

Tabel 2.1.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Coryanata, Isna (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	Telaah pertanggung jawaban publik, Metode kuantitatif	Pengetahuan dewan tentang anggaran jika dipengaruhi dengan adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah, hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel yang penelitian turunkan semuanya ikut mempegaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan.
3.	Werimon, Simon. Ghozali, Imam. Nasir, M. (2007), Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (<i>Study Empiris Di Provinsi Papua</i>)	Sistem pertanggung jawaban publik, Metode kuantitatif	Pengaruh dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawan keuangan daerah (APBD), pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD

Sumber; data diolah 2015

Tabel 2.1.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Juliastuti, Ayu (2013), Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (<i>Studi Empiris Pada DPRD Kota Di Provinsi Sumatera Barat</i>).	Siklus pertanggung jawaban publik, Metode kuantitatif	Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
5.	Rahmawati, Ayu, Arini,(2013) Pengaruh Partisi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo	Sistem pertanggung jawaban publik, Metode kuantitatif	Pengaruh transparansi terhadap pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan

Sumber; data diolah 20

Tabel 2.1.3
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Novatiani, R, Novita. dan Lestari, Nurmalita (2014), Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparasi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kota Bandung	Sistem pertanggung jawaban publik, Metode kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)

Sumber; data diolah 2015

Beberapa penelien diatas menunjukkan beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan reverensi dari penelitian yang akan di teliti, yaitu: (a), akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan dikarenakan oleh pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah (APBD) semakin tinggi akuntabilitas maka semakin tinggi pula tingkat pengawasanya. (b), transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan karena dengan keterbukaan yang dilakukan pemerintah daerah maka pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) akan tidak berjalan maksimal yang disebabkan oleh semakin tinggi tingkat kepercayaan publik.

Penelitian yang akan dikaji mengambil sampel langsung dari seluruh anggota dewan dengan hal ini akan memaksimalkan kinerja pengawasan dari DPRD. Pengelolaan keungan daerah merupakan cermin dari kinerja pemerintah daerah dengan itu pemerintah daerah harus bekerja dengan maksimal jika tidak

maka akan terlihat dengan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan dalam sub unit kerja di pemerintah daerah (SKPD).

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Akuntabilitas

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* mengacu pada pengelolaan pada aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. Sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang steward kepada pemberi pertanggung jawaban (Mardiasmo,2002:21). Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: a) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, b) aspek pengelolaan keuangan daerah secara baik. Perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik.

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002:22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait penghindaran penyalahgunaan jawaban (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas publik dengan demikian memang memiliki dimensi yang luas. Lingkup pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah kepada publik perlu dilakukan pada empat bidang di atas.

Keempatnya pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Pelaksanaan akuntabilitas publik akan dapat berjalan secara optimal, jika keempat aspek akuntabilitas publik dilaksanakan. Keempat dimensi akuntabilitas publik di atas sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini.

Menurut Waluyo (2007: 195) konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap bagian. Tiap-tiap individu pada tiap-tiap klasifikasi bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagianya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*).

Akbar (2012:1-2) mengatakan akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Implikasinya kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan *interchangable*, penerapan pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang *participative* sebagai suatu konsekuensi logis. Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintahan menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan konsep administrasi.

Menurut Sulistoni (2003:35) pemerintah yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

2.2.2. Transparansi

Salah satu prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Menurut Mardiasmo (2002: 105) transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memberikan hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, (Werimon, dkk: 2007) Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasikan informasi maupun aktivitasnya yang relevan.

Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalil atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Prinsip-prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007) secara ringkas mengatakan bahwa, prinsip-prinsip transparansi antara lain:

- a. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah.
- b. Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk diterapkan.

Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Mardiasmo (2004:30) mengatakan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun
- b) Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik.
- c) Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.
- d) Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik. Meningkatkan proses pelayanan yang baik harus didorong dengan etiket baik dari pemerintahan yang baik pula, dalam hal ini pemerintah daerah harus mengedepankan kepentingan masyarakatnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

2.2.3. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur,2011:176). Pengawasan dilakukan guna

memberikan koreksi atas apa yang telah dikerjakan oleh seseorang, lembaga atau instansi.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini agar tercipta dengan keteraturan maka perlu diciptakan pengaturan yang berupa ketentuan yang harus mereka taati bersama sehingga kehidupan mereka berjalan dengan keseimbangan. Banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan baik ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang mereka telah sepakati. Menurut Makmur (2011:186), jenis-jenis pengawasan disesuaikan dengan realita kehidupan manusia:

- a. Pengawasan fungsional. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasa.
- b. Pengawasan masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara.
- c. Pengawasan administratif. Tujuan dari pengawasan administratif dalam kelembagaan khusus bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.
- d. Pengawasan teknis. Untuk mendapatkan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis, maka dibutuhkan adanya pengawasan secara teknik

sesuai dengan bidang pekerjaan teknik itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan atau anggota masyarakat pada umumnya.

- e. Pengawasan pimpinan. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pimpinan, sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.
- f. Pengawasan barang. Pentingnya pengawasan barang adalah untuk menciptakan suatu kejelasan dan jaminan kepada semua yang berkaitan dengan barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa. Yang dimaksud disini adalah imbauan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga kepada seseorang atau beberapa orang pada kehidupannya, sehingga dapat kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.
- h. Pengawasan internal. Kelembagaan negara yang memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif dan semacamnya, pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan

itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksudkan disini pengawasan internal.

- i. Pengawasan eksternal. Kebalikan dari pengawasan internal adalah pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan diluar sub kelembagaan tertentu.

Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : “Kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.”

Menurut Mardiasmo (2002:189) tahap-tahap pengawasan yang harus dilakukan oleh dewan, yaitu :

- a. Pengawasan saat penyusunan
- b. Pengawasan saat pengesahan
- c. Pengawasan saat pelaksanaan

d. Pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran

Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Menurut Halim (2002:147), tujuan pengawasan keuangan daerah secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin keamanan keseluruhan komponen keuangan daerah
- b. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- c. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
- b. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan
- c. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan.

Menurut Halim (2002:150) jenis-jenis Pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya. Sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2. Pengawasan menurut Sifat

Menurut sifat pengawasan dapat dibedakan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Menurut Husen (2005:234), pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Husein, 2005:246).

3. Pengawasan menurut metode

Sedangkan menurut metode pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui pelembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang meliputi BPKP/ITWILPROP/ITWIL KAB/KOTA.

2.2.5. Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, menurut Darise (2009:32) struktur APBD merupakan satu kesatuan kerja yang terdiri dari:

- a. Pendapatan daerah
- b. Belanja daerah
- c. Pembiayaan daerah

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pengelola keuangan daerah dalam arti manajemen keuangan daerah pada hakikatnya adalah pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, yang lebih dikenal dengan APBD. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yakni tercantum dalam pasal 7 UU No. 17/2003 tentang keuangan negara yang pada intinya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, dan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut setiap tahun disusun APBN dan APBD (Halim dkk, 2011:2)

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (*budget policy formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*budget operational planing*). Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, pemerintah daerah menyampaikan rencana

kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan RKPD kepada DPRD. Rancangan KUA selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD (Darise,2009:1).

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Darise (2009:18), selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepala daerah memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
- c. Menetapkan kuasa penggunaan anggaran/barang.
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran.
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

- a. Sekertaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD, dan
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/ barang daerah.

2.2.5. Kajian Teori Menurut Perspektif Islam

Konteks penyelenggaraan pemerintahan dalam hal amanah tanggung jawab serta keterbukaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) seseorang atau instansi pemerintah hendaknya mengacu pada konteks keislaman,

Qs. Al Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*

Dari ayat tersebut terdapat dua poin pelajaran yang dapat dipetik :

- a. Komitmen terhadap iman menjadikan seseorang komitmen dalam menjaga amanah. Karena iman tidak akan bisa bergabung dengan pengkhianatan.
- b. Berkhianat merupakan perilaku buruk dan kotor. Karena itu, barangsiapa yang melakukan pengkhianatan dengan sadar, maka balasan dan siksaanya sangat pedih (Tafir Al-Quran:2013)

An-Nahl ayat 95 mengatakan jika amanah atau tanggung jawab harus dilaksanakan. Sumpah yang telah dilakukan dalam awal mengemban tugas merupakan janji kepada Allah untuk memimpin masyarakat luas. Qs. An-Nahl Ayat 95;

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Pengawasan merupakan hal yang perlu untuk menyeimbangkan dalam kehidupan untuk meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah dan membenarkan yang hak. Al-Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah Ekonomi Islam. Pada awal pertumbuhannya hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahy munkar* kewenangan ini sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan agama. Dalam perkembangannya hisbah adalah institusi yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.

Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara yang berperan sebagai pengambil keputusan dan seseorang yang diberikan tugas dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi *al-hisbah* ini, ditambah beliau sendirilah yang secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. HR. Muslim menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.”

2.3. Kerangka Konseptual

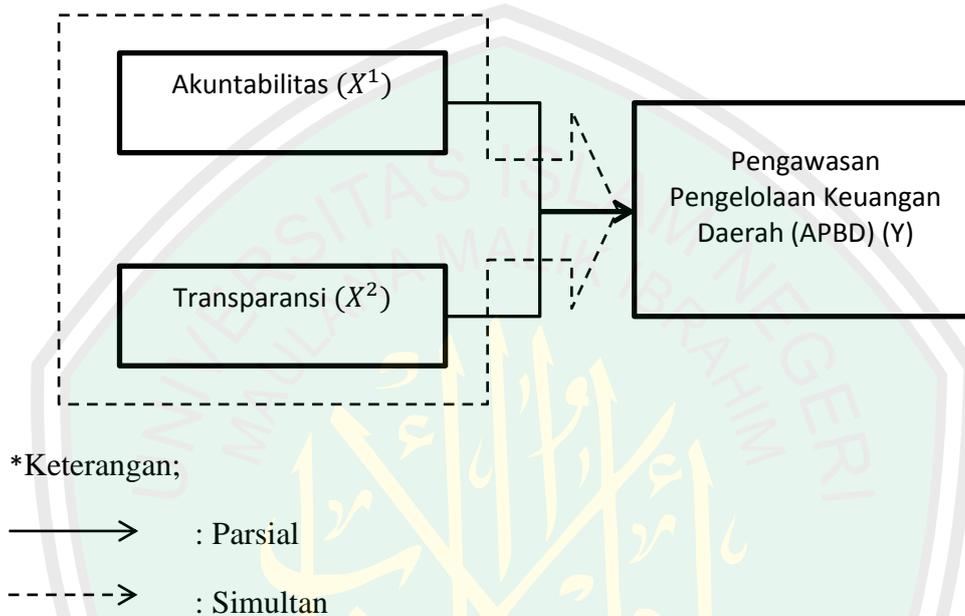
Menurut Waluyo (2007:211), penyelenggara fungsi-fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal, efektif dan efisien. Urusan pemerintahan diikuti oleh pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. meski demikian, hal ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Mengkoreksi jalanya pemerintahan yang baik maka dibutuhkan konsep akuntabilitas oleh pemerintah sebagai pertanggung jawaban pemerintah dalam menjalankan program dari pengelolaan APBD tersebut. Sedangkan dalam melaksanakan keterbukaan publik untuk mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan maka pemerintah harus melakukan transparansi dalam pengelolaan APBD.

Pengawasan merupakan suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur,2011:176). Sehingga cukup jelas bahwa pengawasan harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah sendiri maupun oleh masyarakat baik melalui perlakilan atau individu terhadap pengelolaan APBD agar tidak terjadi kejanggalan yang bisa merugikan masyarakat.

Menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan lagi kebenarannya. Hipotesis disebut sebagai kesimpulan karena hipotesis merupakan kesimpulan dari sebelum pelaksanaan penelitian (Hadi, 2006:89)

2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengawasan Pengelolaan APBD. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan hasil yang berbeda. Juliastuti (2013) menyatakan

akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Pernyataan tersebut dimentahkan dengan penelitian Wahyudi (2007), dan diperkuat oleh Coryanata (2007) yang menyatakan semakin tinggi tingkat akuntabilitas dari pemerintah maka semakin tinggi tingkat pengawasan dewan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, dalam hal ini jika tingkat akuntabilitas tinggi dari pemerintah daerah maka pertanggung jawaban sebagai pengawas dari DPRD akan semakin tinggi. Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasa pengelolaan keuangan daerah (APBD).

2.4.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Juliastuti (2013) menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Wahyudi (2007) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Werimon dkk (2007) menyatakan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Transparansi merupakan prinsip menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang

dicapai (Werimon dkk, 2007). Hasil penelitian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

H₂ : *Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD)*

2.4.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Secara Simultan Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Akuntabilitas dan transparansi erat kaitanya guna menunjang keselarasan dalam menjalankan iklim pemerintahan yang baik dan bersih supaya masyarakat dapat dengan mudah dalam pengawasan. Dari penelitian Novatiani & Lestari (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Demikian juga Coryanata (2007) juga menyatakan pendapat yang sama bahwa akuntabilitas dan transparansi keduanya berpengaruh simultan terhadap pengawasan keuangan daerah. Juliastuti (2013) berasumsi yang sama dalam penelitiannya.

Akuntabilitas dan transparansi akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain jika dijalankan pemerintah daerah dengan bersama-sama untuk menunjang prinsip pemerintahan yang baik dan berdampak kepercayaan masyarakat dan dewan yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan yang berfungsi untuk mengontrol dari proses akuntabilitas dan transparansi juga akan mempengaruhi kinerja dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

H₃ : *Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh simultan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD)*



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif adalah data yang berupa angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti (Hadi, 2006:42).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di DPRD II Kabupaten Trenggalek periode masa bakti 2014-2019. Dilakukan di DPRD karena DPRD merupakan wakil rakyat yang mewakili aspirasi rakyat sebagai *check and balance* dari pemerintah.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan di teliti. Populasi adalah seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian (Hadi, 2006:45). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat II Kabupaten Trenggalek dengan jumlah anggota dewan sebanyak 45 anggota terbagi dalam beberapa komisi.

Pemilihan penelitian di DPRD II Kabupaten Trenggalek karena DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang memiliki fungsi sebagai pengawasan jalannya roda pemerintahan kabupaten Trenggalek. DPRD akan mengawasi dari berbagai sudut kerja pemerintah daerah karena memiliki wewenang sebagai pengawas yang mewakili rakyat secara langsung. Salah satu

yang di awasi yaitu soal anggaran keuangan daerah yang setiap tahunnya menjadi kesepakatan bersama dalam menentukan dan menjalankan, sebagaimana pemerintah daerah bertugas menjalankan anggaran keuangan daerah sedangkan DPRD sebagai pengawasnya.

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, diambil sebagai sumber data penelitian (Hadi. 2006:46). Data penelitian ini telah diketahui, sehingga data sampel yang akan digunakan sama dengan populasinya yaitu 45 orang atau seluruh anggota DPRD II kabupaten Trenggalek.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Metode sensus dilakukan karena anggota DPRD terbatas yaitu 45 orang atau sama dengan jumlah populasinya. Pengambilan sampel disebar di seluruh anggota dewan melalui sekretariat dewan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer didapat oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Objek penelitian diperoleh dari anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek periode 2014-2019.

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan) yang dilakukan dengan cara penyebaran secara langsung, yaitu dilakukan kuesioner diantarkan langsung kepada responden. Pengumpulan kuesioner juga dilakukan secara langsung yaitu mengambil langsung kepada responden atau sekretariat.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini dapat dikempokkan menjadi dua variabel, yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) dalam penelitian ini terdiri dari: akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kuesioner yang akan digunakan adalah kuesioner menurut penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2007) dan Juliastuti (2013) dan dikembangkan menurut kebutuhan dari penelitian yang akan dilakukan. Indikator yang digunakan di ambil dari pendapat seseorang yaitu; akuntabilitas diambil dari penjelasan Ellwood (1993) dalam buku Mardiasmo (2002) penelitian Juliastuti (2013), transparansi diambil dari penelitian Juliastuti (2013), dan pengawasan diambil dari penelitian wahyudi (2007) menurut pendapat Mardiasmo (2002)

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Item
Akuntabilitas (X_1)	Kejujuran dan hukum	Pengaruh dan kepatuhan hukum sebagai dasar anggaran
	Proses	Proses penyusunan sesuai mekanisme yang berlaku
	Program	Program anggaran apakah telah memiliki tujuan dan manfaat untuk kepentingan publik
	Kebijakan	Masyarakat dilibatkan dalam menentukan kebijakan dan bisa dipertanggung jawabkan terhadap publik

Sumber; data diolah 2015

Tabel 3.1.1
Definisi Operasional Variabel (Lanjutan)

Variabel	Indikator	Item
Transparansi (X_2)	Informasi	DPRD bersama pemerintah akan sama-sama terbuka dalam transparansi pengelolaan anggaran
	Kemudahan	Akses mudah masyarakat luas dalam mengetahui kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah
	Sistem	Sistem pemberian informasi publik dalam peningkatan kebijaka transparansi
	Kemampuan	Transparansi meningkatkan penjangingan aspirasi masyarakat
Pengawasan (Y)	Penyusunan	Masyarakat sebagai objek oleh DPRD untuk penyusunan anggaran bersama pemerintah daerah
	Pengesahan	DPRD terlibat dalam pengesahan APBD oleh pemerintah daerah
	Pelaksanaan	APBD berperan aktif dalam setiap pelaksanaan anggaran
	Pertanggung jawaban	Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam setiap anggaran

Sumber; data diolah 2015

3.7. Analisis Data

3.7.1. Uji Kualitas Data

sebelum mengolah data penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji terhadap kualitas data yang dihasilkan dari jawaban responden berdasarkan responden yang ada. Uji kualitas data dilakukan untuk memastikan kuesioner yang digunakan benar-benar valid dan realibel dalam mengukur variabel.

3.7.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan tingkat akurasi data. Uji validitas digunakan untuk menguji instrumen penelitian agar instrumen tersebut

dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuannya. Uji validitas bertujuan untuk mengukur apakah pertanyaannya dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2011:52). Sunyoto (2013:85) menyatakan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.

Metode yang digunakan menggunakan koefisien korelasi *pearson correlation*. Kriteria yang ditetapkan adalah r_{hitung} (koefisien korelasi) lebih besar dari r_{tabel} (nilai kritis) pada taraf signifikansi 0,05. Jika koefisien korelasinya lebih besar dari nilai kritisnya maka instrumen pengukuran dapat dikatakan valid.

3.7.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2011:47).

Kriteria yang ditetapkan dalam mengetahui data adalah nilai koefisien reliabilitas *alpha* yang lebih besar dari 0,60. Jika nilai koefisien reliabilitas *alphanya* lebih besar dari 0,60 maka instrumen pengukur variabel dapat dikatakan reliabel.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1. Multikolinearitas

Menurut Sunyoto (2013:87), uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independent variabel ($X_{1,2,3,...n}$) dimana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi. Dikatakan terjadi

multikolinieritas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak multikolinieritas jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60. Menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat digunakan cara lain yaitu dengan;

- a. Nilai *tolerance* adalah besaran tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (α).
- b. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan buku kuadrat.

Nilai *tolerance* (α) dan *variance inflation factor* (VIF) dapat dicari dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut:

- a. Besar nilai *tolerance* (α) : $\alpha = 1/ VIF$
- b. Besaran nilai *variance inflation factor* (VIF) : $VIF = 1/ \alpha$

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika: $\alpha_{hitung} < \alpha$ dan $VIF_{hitung} > VIF$. Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika: $\alpha_{hitung} > \alpha$ dan $VIF_{hitung} < VIF$.

3.7.2.2. Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang sama dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau beda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika terjadi homoskedastisitas (Sunyoto, 2013:90).

Analisis uji asumsi heteroskedastitas hasil output SPSS melalui grafik *scatterplot* antara *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu

$X = Y$ hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu $Y = Y$ prediksi – Y rill). Homoskedastitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang.

3.7.2.3. Normalitas

Uji normalitas yaitu menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2013:92).

Uji normalitas yang digunakan yaitu uji normalitas cara grafik histogram dan normal probability plots. Cara grafik histogram dalam menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan membandingkan antara data rill atau nyata dengan garis kurva yang terbentuk, apakah normal atau memang normal sama sekali. Jika data rill membentuk garis kurva cenderung tidak simetris terhadap *mean* (U), maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal dan sebaliknya. Cara normal *probability plot* lebih handal daripada grafik histogram, karena cara ini membandingkan data rill dengan data distribusi normal (otomatis oleh komputer) secara kumulatif. Suatu data dikatakan normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal.

3.7.2.4. Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi autokorelasi dilakukan dengan data *time series* atau data yang mempunyai seri waktu (Sunyoto, 2013:97-98)

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji durbin-watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$
- c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau $DW > +2$

3.7.3. Pengujian Hipotesis

3.7.3.1. Uji F (*F-test*)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti secara bersama-sama variabel dependen mempunyai pengaruh terhadap variabel independen.

Berdasar uji statistik tersebut, penolakan hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 0,05 (taraf kepercayaan 0,95) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh yang simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada pengaruh yang simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.7.3.2. Uji t (*t-test*)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Untuk mengetahui variabel bebas manakah yang dominan atau paling berpengaruh diantara variabel yang lain

Hipotesis dalam uji t adalah:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten yang di pimpin oleh bupati (eksekutif), yang berada di propinsi Jawa Timur bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung dengan luas wilayah 126. 140 Ha, dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan, terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 Desa dan Kelurahan. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,68 km (<http://www.trenggalekkab.go.id>). Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek yaitu 789.893 jiwa menurut Permendagri No. 66 Tahun 2011 (<http://www.kemendagri.go.id>).

4.1.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD menurut UU No. 23 Tahun 2014; DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD juga mempunyai tugas dan wewenang antara lain adalah:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

DPRD mempunyai hak:

- a. Interpelasi
- b. Angket
- c. Hak menyatakan pendapat.

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Protokoler
- h. Keuangan dan administratif

4.1.1.2. DPRD II Kabupaten Trenggalek

DPRD II Kabupaten Trenggalek terdiri dari 45 anggota yang terbagi dari beberapa partai yang ikut pemilu. Pada tahun 2014 KPU mengadakan pemilu dengan peserta partai politik di Indonesia yang telah lolos berbagai seleksi yang berhak mengikuti pemilu. Partai yang berhak ikut yaitu P. NasDem, PKB, PKS, PDIP, P. Golkar, P. Gerindra, P. Demokrat, PAN, PPP, P. Hanura, PBB, dan PKPI.

Pada pemilu 2014 Kabupaten Trenggalek dibagi dalam beberapa daerah pemilihan (dapil) yaitu dapil 1, 2, 3, dan 4. Setiap dapil terdiri dari beberapa kecamatan. Setiap dapil ditentukan beberapa peserta pemilu dari berbagai partai peserta pemilu untuk menjaring suara terbanyak untuk diangkat menjadi anggota dewan (DPRD).

KPU Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 telah menjaring dari hasil perolehan suara terbanyak maka telah menentukan siapa yang berhak mewakili

suara mayoritas peserta pemilu dari setiap dapil untuk duduk sebagai anggota dewan. Dari peserta pemilu yang terpilih dari perolehan suara terbanyak telah diperoleh 45 yang berhak sebagai anggota DPRD, tetapi tidak semua anggota partai peserta pemilu memiliki wakil di DPRD II Kabupaten Trenggalek. P. NasDem dan PBB tidak memiliki wakil yang bisa lolos mejadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek.

Pada pemilu 2014 peserta pemilu diperoleh beberapa orang dan ditetapkan menjadi DPRD oleh KPU. Anggota DPRD yang telah ditetapkan selanjutnya menentukan susunan struktur organisasi yang menetapkan ketua dan wakil ketua beserta anggota dan alat kelengkapan dewan untuk menunjang kinerjanya. Ketua DPRD II Kabupaten Trenggalek periode 2014-2015 adalah Samsul Anam dari PKB, sedangkan wakilnya yaitu Guswanto (PDIP), Lamuji (P. Demokrat), dan Agus Cahyono dari PKS.

DPRD II Kabupaten Trenggalek dalam bekerja dibagi dalam empat komisi dengan dengan beberapa bidang, yaitu:

- Komisi 1: Bidang Pemerintahan dengan ruang lingkup tugas meliputi ketertiban, kependudukan, informasi teknologi dan pers, hukum dan perundang-undangan, kerja sama, kepegawaian, sosial dan politik, pertahanan, dan organisasi kemasyarakatan.
- Komisi 2: Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan ruang lingkup tugas meliputi perdagangan, perindustrian, pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, logistik, UMKM, pariwisata, aset dan keuangan daerah, pajak dan redistribusi, energi, dan penanaman modal.

- Komisi 3: Bidang Pembangunan dengan ruang lingkup tugas meliputi perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, tata ruang, pertanaman, kebersihan, perhubungan, pemukiman dan perumahan rakyat, dan pemberdayaan masyarakat.
- Komisi 4: Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan ruang lingkup tugas meliputi ketenaga kerjaan, penduduk, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, sosial kesehatan dan keluarga berencana, peran wanita dan perlindungan anak, transmigrasi, dan penanggulangan bencana alam.

Kerja dari beberapa komisi tersebut akan disinergikan dengan kerja pemerintah daerah atau dari pihak eksekutif, dimana DPRD akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. DPRD akan berjalan bersama untuk menentukan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas.

4.1.1.3. Data Responden

Obyek penelitian ini yang digunakan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II (DPRD II) Kabupaten Trenggalek, oleh sebab itu dalam penelitian ini ada beberapa data responden untuk memperkuat penelitian ini, berikut pemaparannya:

Tabel 4.1
Pengumpulan Data

Responden	Kuesioner yang disebar	Kuesioner yang kembali	Prosentase
DPRD II Kab. Trenggalek	45	30	66,67%

Sumber: data diolah 2015

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa, dari 45 kuesioner yang disebarkan kepada responden, yang kembali yaitu 30 kuesioner dengan prosentase 66,67 %.

4.1.1.4. Karakter Responden

Sumber data dalam penelitian ini diambil berdasarkan jawaban kuesioner yang disebarkan pada DPRD II Kabupaten Trenggalek dan karakteristik responden dibagi menjadi 5 yaitu; umur, jenis kelamin, fraksi, komisi, dan klasifikasi akademik dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Untuk menggambarkan karakteristik responden berdasarkan gambaran umur seorang anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek, hasil penjabaran dari 30 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia	Banyak Responden	Prosentase
21-30	1	3,33%
31-40	6	20%
41-50	12	40%
51-60	7	23,34%
61-70	4	13,33%
Total	30	100%

Sumber: data diolah 2015

Tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan umur diatas terlihat bahwa responden umur 41-50 mendominasi, yaitu sebanyak 40%, sedangkan di umur 21-30 mendominasi paling sedikit, yaitu 3,33% dari total responden.

2. Deskripsi Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk menggambarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, maka berikut hasil penjabaran dari 30 responden:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Banyaknya Responden	Prosentase
Laki-laki	27	90%
Perempuan	3	10%
Total	30	100%

Sumber : Data diolah 2015

Berdasarkan tabel 4.3 distribusi frekuensi di atas terlihat bahwa responden yang terbanyak yaitu laki-laki sebanyak 27 orang atau 90% dan perempuan sebanyak 3 orang atau 10%.

3. Deskripsi Karakteristik Berdasarkan Fraksi

Berdasarkan deskripsi karakteristik menurut fraksi di DPRD II Kabupaten Trenggalek menurut dari responden yang sebanyak 30 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Fraksi

Fraksi	Banyak Responden	Prosentase
F-PKB	7	23,33%
F-PDIP	4	13,34%
F-Demokrat	9	30%
F-PIS	7	23,33%
F-PG	3	10%
	30	100%

Sumber: data diolah 2015

Berdasarkan tabel 4.4 distribusi frekuensi diatas terlihat bahwa responden dari F-Demokrat menempati daftar responden terbanyak, yaitu sebesar 30%. Disusul oleh F-PKB dan F-PIS yang sama-sama sebanyak 23,33%, lalu F-PDIP sebanyak 13,34%, dan yang terakhir adalah F-PG sebanyak 10%.

4. Deskripsi Karakteristik Berdasarkan Komisi

Berdasarkan deskripsi karakteristik per komisi dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Komisi

Komisi	Banyak Responden	Prosentase
I	8	26,67%
II	7	23,33%
III	7	23,33%
IV	7	23,33%
Pimpinan	1	3,33
Total	30	100%

Sumber: data diolah 2015

Berdasarkan tabel 4.5 distribusi frekuensi diatas terlihat bahwa responden pada karakteristik komisi I lebih mendominasi, yaitu sebesar 26,34% sedangkan komisi II, III, IV sama-sama sebesar 23,33%, yang terakhir adalah jajaran pimpinan dewan hanya sebesar 3,33%.

5. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan kualifikasi Akademik

Berdasarkan hasil penelian yang didapat, berdasarkan deskripsi karakteristik responden berdasar kualifikasi akademik maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Kualifikasi Akdemik

Kualifikasi Akademik	Banyak Responden	Prosentase
SMA	6	20%
S1	18	60%
S2	6	20%
S3	0	0%
Total	30	100%

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4.6 distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan kualifikasi akademik maka lulusan S1 mendominasi sebesar 60%, sedangkan lulusan SMA dan S2 memiliki prosentase sama yaitu sebesar 20%, dan lulusan S3 masih belum ada.

4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) dan Pengawasan (Y). Dimana Masing-masing variabel terdiri atas beberapa item pertanyaan dalam kuisisioner, yaitu:

a. Variabel Akuntabilitas (X_1)

Variabel akuntabilitas (X_1) terdapat 4 item indikator, yaitu kejujuran dan hukum, proses, program dan kebijakan. Semua indikator dalam akuntabilitas (X_1) dijabarkan dalam 13 pertanyaan. Berikut hasil dari distribusi frekuensi jawaban responden:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel

No	Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		£
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	%
1	Kejujuran dan hukum	item_1	-	-	-	-	1	3,33	22	73,3	7	23,3	100
		item_2	-	-	-	-	-	-	13	43,3	17	56,7	100
		Item_3	-	-	-	-	-	-	9	30	21	70	100
2	Proses	item_4	-	-	-	-	-	-	17	56,7	13	43,3	100
		item_5	-	-	-	-	-	-	9	30	21	70	100
		item_6	-	-	-	-	5	16,7	14	46,7	11	36,7	100
3	Program	item_7	-	-	-	-	3	10	12	40	15	50	100
		item_8	-	-	-	-	-	-	16	53,3	14	46,7	100
		item_9	-	-	-	-	-	-	9	30	21	70	100
4	Kebijakan	item_10	-	-	-	-	5	16,7	16	53,3	9	30	100
		item_11	-	-	-	-	-	-	9	30	21	70	100
		item_12	-	-	-	-	-	-	21	70	9	30	100
		item_13	-	-	-	-	-	-	20	66,7	10	33,3	100

Sumber : Data diolah, 2015

- Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan indikator kejujuran dan hukum, dengan 3 item pertanyaan, yaitu;
 - Item_1, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 23,3% (7 responden), setuju (S) sebanyak 73,3% (22 responden) dan yang menyatakan kurang setuju (KS) sebanyak 3,33% (1 responden).
 - Item_2, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 56,7% (17 responden), dan setuju (S) sebanyak 43,3% (13 responden).

- Item_3, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 70% (21 responden), dan setuju (S) sebanyak 30% (9 responden).

Hasil indikator kejujuran dan hukum di atas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam hal akuntabilitas dinilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

2. Indikator proses, dengan 3 item pertanyaan, yaitu;

- Item_4, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 43,3% (13 responden), dan setuju sebanyak 56,7% (17 responden).
- Item_5, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 70% (21 responden), setuju (S) sebanyak 30% (9 responden).
- Item_6, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 36,7% (11 responden), setuju (S) sebanyak 46,7% (17 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 16,7% (5 responden).

Hasil indikator proses di atas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam hal akuntabilitas dinilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

3. Indikator program, dengan 3 item pertanyaan, yaitu;

- Item_7, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 50% (15 responden), setuju (S) sebanyak 40% (12 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 10% (3 responden).
- Item_8, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 46,7% (14 responden), dan setuju (S) sebanyak 53,3% (16 responden).
- Item_9, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 70% (21 responden), dan setuju (S) sebanyak 30% (9 responden).

Hasil indikator program diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam hal akuntabilitas dinilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

4. Indikator kebijakan, dengan 4 item pertanyaan, yaitu;

- Item_10, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 30% (9 responden), setuju (S) sebanyak 53,3% (16 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 16,7% (5 responden).
- Item_11, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 70% (21 responden), dan setuju (S) sebanyak 30% (9 responden).
- Item_12, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 30% (9 responden), dan setuju (S) sebanyak 70% (21 responden).
- Item_13, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 33,3% (10 responden), dan setuju (S) sebanyak 66,7% (20 responden).

Hasil indikator program diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam hal akuntabilitas dinilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

b. Variabel Transparasi (X_2)

Variabel Transparasi (X_1) terdapat 4 indikator, yaitu informasi, kemudahan, sistem, dan kemampuan. Seluruh indikator dalam transparansi (X_1) dijabarkan dalam 8 item pertanyaan. Berikut adalah hasil dari distribusi frekuensi jawaban responden:

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel

No	Indikator	Item	STS		TS		KS		S		SS		£ %
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Informasi	item_14	-	-	-	-	-	-	6	20	24	80	100
		item_15	-	-	-	-	-	-	10	33,3	20	66,7	100
2	Kemudahan	item_16	-	-	-	-	-	-	22	73,3	8	26,7	100
		item_17	-	-	-	-	9	30	17	56,7	4	13,3	100
3	Sistem	item_18	-	-	-	-	-	-	11	36,7	19	63,3	100
		item_19	-	-	-	-	1	3,33	14	46,7	15	50	100
4	Kemampuan	item_20	-	-	-	-	4	13,3	20	66,7	6	20	100
		item_21	-	-	-	-	-	-	9	30	21	70	100

Sumber : Data diolah, 2015

1. Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan indikator informasi, dengan 2 item pertanyaan, yaitu;

- Item_14, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 80% (24 responden), dan setuju (S) sebanyak 20% (6 responden).
- Item_15, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 66,7% (20 responden), dan setuju (S) sebanyak 33,3% (10 responden).

Hasil indikator informasi diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam hal transparansi dinilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

2. Indikator kemudahan, dengan 2 item pertanyaan, yaitu;

- Item_16, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 26,7% (8 responden), dan setuju (S) sebanyak 73,3% (22 responden).
- Item_17, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 13,3% (4 responden), setuju (S) sebanyak 56,7% (17 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 30% (9 responden).

Hasil indikator kemudahan diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam hal transparansi dinilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

3. Indikator sistem, dengan 2 item pertanyaan, yaitu;

- Item_18, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 63,3% (19 responden), dan setuju (S) sebanyak 36,7,3% (11 responden).
- Item_19, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 50% (15 responden), setuju (S) sebanyak 46,7% (14 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 3,33% (1 responden).

Hasil indikator sistem diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam hal transparansi dinilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

4. Indikator kemampuan, dengan 2 item pertanyaan, yaitu;

- Item_20, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 20% (6 responden), setuju (S) sebanyak 66,7% (20 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 13,3% (4 responden)
- Item_21, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 70% (21 responden), dan setuju (S) sebanyak 30% (9 responden).

Hasil indikator kemampuan diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam hal transparansi dinilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

c. Variabel Pengawasan (Y)

Variabel pengawasan (Y) terdapat 4 indikator, yaitu penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Indikator pengawasan dijabarkan dalam 12 pertanyaan. Berikut ini adalah hasil dari distribusi frekuensi jawaban responden:

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Item-Item Variabel

No	Indikator	Item	STS		TS		KS		TS		SS		£ %
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Penyusunan	item_22	-	-	-	-	-	-	4	13,3	26	86,7	100
		item_23	-	-	-	-	3	10	4	13,3	23	76,7	100
		item_24	-	-	-	-	-	-	7	23,3	23	76,7	100
2	Pengesahan	item_25	-	-	-	-	-	-	11	36,7	19	63,3	100
		item_26	-	-	-	-	3	10	21	70	6	20	100
		item_27	-	-	-	-	1	3,33	15	50	14	46,7	100
3	Pelaksanaan	item_28	-	-	-	-	-	-	6	20	24	80	100
		item_29	-	-	-	-	-	-	4	13,3	26	86,7	100
		item_30	-	-	-	-	2	6,67	11	36,7	17	56,7	100
4	Pertanggung jawaban	item_31	-	-	-	-	1	3,33	10	33,3	19	63,3	100
		item_32	-	-	-	-	5	16,7	10	33,3	15	50	100
		item_33	-	-	-	-	-	-	5	16,7	25	83,3	100

Sumber : Data diolah, 2015

1. Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan indikator penyusunan, dengan 3 item pertanyaan, yaitu;

- Item_22, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 86,7% (26 responden), dan setuju (S) sebanyak 13,3% (4 responden).
- Item_23, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 76,7% (23 responden), setuju (S) sebanyak 13,3% (4 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 10% (3 responden).
- Item_24, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 76,7% (23 responden), dan setuju (S) sebanyak 23,3% (7 responden).

Hasil indikator penyusunan diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dengan nilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

2. Indikator pengesahan, dengan 3 item pertanyaan, yaitu;

- Item_25, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 63,3% (19 responden), dan setuju (S) sebanyak 36,7% (11 responden).
- Item_26, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 20% (6 responden), setuju (S) sebanyak 70% (21 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 10% (3 responden).
- Item_27, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 46,7% (14 responden), setuju (S) sebanyak 50% (15 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 3,33% (1 responden).

Hasil indikator pengesahan diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dengan nilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

3. Indikator pelaksanaan, dengan 3 item pertanyaan, yaitu;

- Item_28, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 80% (24 responden), dan setuju (S) sebanyak 20% (6 responden).
- Item_29, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 86,7% (26 responden), dan setuju (S) sebanyak 13,3% (4 responden).
- Item_30, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 56,7% (17 responden), setuju (S) sebanyak 36,7% (11 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 6,67% (2 responden).

Hasil indikator pelaksanaan diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dengan nilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

4. Indikator pertanggung jawaban, dengan 3 item pertanyaan, yaitu;
- Item_31, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 63,3% (19 responden), setuju (S) sebanyak 33,3% (10 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 3,33% (1 responden).
 - Item_32, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 50% (15 responden), setuju (S) sebanyak 33,3% (10 responden), dan kurang setuju (KS) sebanyak 16,7% (5 responden).
 - Item_33, responden yang memberikan nilai sangat setuju (SS) sebanyak 83,3% (25 responden), dan setuju (S) sebanyak 16,7,3% (5 responden).

Hasil indikator pertanggung jawaban diatas menyatakan bahwa, anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) dengan nilai baik. Hal ini merujuk pada hasil yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S) masih mendominasi.

4.1.3. Uji Kualitas Data

4.1.3.1. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukuran mampu mengukur apa yang ingin diukur. Valid tidaknya suatu item instrument dapat diketahui dengan membandingkan r_{hitung} (koefisien korelasi) lebih besar dari r_{tabel} (nilai kritis) untuk *degree of freedom* = n-k dalam hal ini 30-2 atau df 28 dan satu daerah satu pengujian dengan alpha 0,05 didapat r_{tabel} 0,374. Jika r_{hitung} untuk r tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari r_{tabel} maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.10
Uji Validitas Akuntabilitas Awal

	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item_1	.410	.374	Valid
Item_2	.432	.374	Valid
Item_3	.482	.374	Valid
Item_4	.335	.374	Tidak valid
Item_5	.661	.374	Valid
Item_6	.556	.374	Valid
Item_7	.418	.374	Valid
Item_8	.521	.374	Valid
Item_9	.549	.374	Valid
Item_10	.485	.374	Valid
Item_11	.571	.374	Valid
Item_12	.437	.374	Valid
Item_13	.385	.374	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 4.11
Uji Validitas Transparansi Awal

	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item_14	.433	.374	Valid
Item_15	.549	.374	Valid
Item_16	.592	.374	Valid
Item_17	.567	.374	Valid
Item_18	.644	.374	Valid
Item_19	.636	.374	Valid
Item_20	.498	.374	Valid
Item_21	.486	.374	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 4.12
Uji Validitas Pengawasan Awal

	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item_22	.577	.374	Valid
Item_23	-.135	.374	Tidak valid
Item_24	.707	.374	Valid
Item_25	.506	.374	Valid
Item_26	.345	.374	Tidak valid
Item_27	.468	.374	Valid
Item_28	.484	.374	Valid
Item_29	.355	.374	Tidak valid
Item_30	.609	.374	Valid
Item_31	.653	.374	Valid
Item_32	.388	.374	Valid
Item_33	.573	.374	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel diatas (tabel 4.10; tabel 4.11; tabel 4.12) merupakan uji validitas awal dari kuesioner yang disebarakan, sehingga terdapat item pertanyaan yang belum valid dan akan dihapus untuk uji selanjutnya. Untuk uji selanjutnya masih akan dilakukan uji validitas lanjutan untuk mencari keseluruhan item pertanyaan yang valid sedangkan yang valid tidak akan di uji validitas ulang, yang belum valid sampai keseluruhan dinyatakan valid.

Uji validitas awal diatas disimpulkan, mengenai keterangan yang dinyatakan tidak valid dikarenakan ada beberapa hal dugaan mengenai ketidak validan dalam uji validitas awal, yaitu; (1) mengenai ketidak pahaman responden menangkap pertanyaan. (2) mengenai keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan dengan kesibukan yang dimiliki responden. (3) rangkaian kata dalam setiap pertanyaan yang mungkin menyebabkan responden sulit memahami dari tujuan pertanyaan. Berikut uji validitas lanjutan;

Tabel 4.13
Uji Validitas Akuntabilitas Lanjutan

	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item_1X	.328	.374	Tidak valid
Item_2X	.436	.374	Valid
Item_3X	.458	.374	Valid
Item_5X	.691	.374	Valid
Item_6X	.558	.374	Valid
Item_7X	.455	.374	Valid
Item_8X	.502	.374	Valid
Item_9X	.574	.374	Valid
Item_10X	.517	.374	Valid
Item_11X	.598	.374	Valid
Item_12X	.430	.374	Valid
Item_13X	.409	.374	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 4.14
Uji Validitas Pengawasan Lanjutan

	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item_22Y	.541	.374	Valid
Item_24Y	.660	.374	Valid
Item_25Y	.581	.374	Valid
Item_27Y	.538	.374	Valid
Item_28Y	.444	.374	Valid
Item_30Y	.622	.374	Valid
Item_31Y	.665	.374	Valid
Item_32Y	.479	.374	Valid
Item_33Y	.590	.374	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Dilakukan uji validitas lanjutan diatas (tabel 4.14 dan tabel 4.15) hanya di lakukan dalam variabel akuntabilitas (X_1) dan variabel pengawasan (Y) dikarenakan uji validitas variabel transparansi awal (X_2) telah memenuhi syarat uji validitas dan dinyatakan keseluruhan valid. Dalam uji validitas variabel akuntabilitas (tabel 4.14) masih ada persoalan kevalidan, oleh sebab itu terdapat dugaan bahwa, item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid dipengaruhi oleh pergerakan nilai *Pearson Correlation* dari item-item lain sehingga nilai *Pearson Correlation* setiap item megalami gejolak naik turun. Berikut uji validitas variabel akuntabilitas (X_1);

Tabel 4.15
Uji Validitas Akuntabilitas

	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item_2Xx	.418	.374	Valid
Item_3Xx	.457	.374	Valid
Item_5Xx	.700	.374	Valid
Item_6Xx	.568	.374	Valid
Item_7Xx	.497	.374	Valid
Item_8Xx	.473	.374	Valid
Item_9Xx	.578	.374	Valid
Item_10Xx	.552	.374	Valid
Item_11Xx	.627	.374	Valid
Item_12Xx	.394	.374	Valid
Item_13Xx	.402	.374	Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasar tabel di atas yang telah dilakukan uji validitas (tabel 4.15 untuk akuntabilitas; tabel 4.11 untuk transparansi; dan tabel 4.14 untuk pengawasan) terlihat bahwa korelasi antara masing-masing item pertanyaan terhadap skor konstruk dari setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Disimpulkan bahwa tidak semua item pertanyaan dinyatakan valid dari keseluruhan pertanyaan sehingga perlu dilakukan uji lanjutan sampai mendapatkan kevalidan keseluruhan dari setiap variabel. Untuk keseluruhan kuesioner yang di ajukan lebih rincinya bisa dilihat pada lembar lampiran.

4.1.3.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Konsisten disini berarti kuesioner tersebut konsisten jika digunakan untuk mengukur konsep atau konstruk dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Pada program SPSS, metode ini dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha*,dimana kuesioner dikatakan reliable

jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Berikut penjelasan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Akuntabilitas	.773
Transparansi	.727
Pengawasan	.732

Sumber : Data diolah, 2015

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach's Alpha* yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

4.1.4. Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1. Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi, menggunakan cara (1) besaran *coefficient correlations* antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. (2) menggunakan besaran *tolerance* (α) dan *variance inflation factor* (VIF) dengan menggunakan alpha atau tolerance = 10% atau 0,10 maka VIF =10. Jika variable bebas dapat memenuhi kriteria tersebut maka variable bebas tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variable bebas lainnya.

Tabel 4.17
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	.902	1.108
	Transparansi	.902	1.108

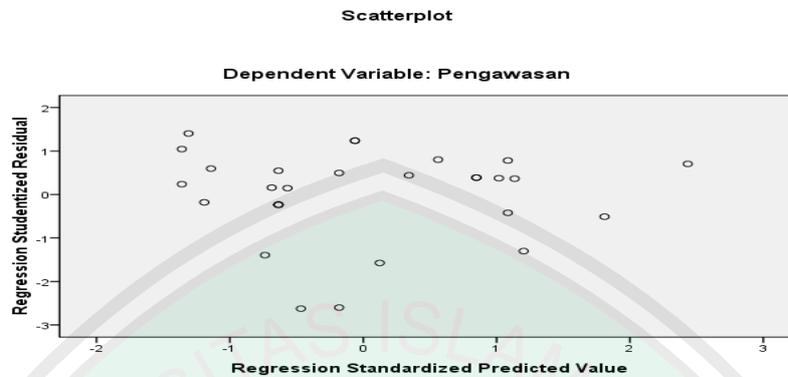
Sumber : Data diolah, 2015

Menggunakan besaran *tolerance* = 10% atau 0,10 maka $VIF = 10$. Maka dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besar VIF hitung sebesar 1,108 lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* variabel bebas (0,902 = 90,2%) diatas 10% dapat disimpulkan bahwa antarvariabel bebas dan tidak terjadi multikolinieritas.

4.1.4.2. Uji heteroskedastisitas

Analisis uji asumsi heteroskedastitas hasil uotput SPSS melalui grafik *scatterplot* antara *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi - Y rill). Homoskedastitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang. Berikut adalah penjelasan dalam bentuk tabel :

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah, 2015

Analisis hasil output SPSS di atas didapatkan titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 (nol) pada sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Jadi kesimpulannya variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

Dilihat dari hitungan angka menggunakan uji heteroskedastisitas koefisien korelasi spearman's rho, maka hasilnya adalah:

Tabel 4.18
Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			Transparansi	Pengawasan	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Transparansi	Correlation Coefficient	1.000	.122	.142
		Sig. (2-tailed)	.	.521	.453
		N	30	30	30
	Pengawasan	Correlation Coefficient	.122	1.000	.081
		Sig. (2-tailed)	.521	.	.672
		N	30	30	30
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.142	.081	1.000
		Sig. (2-tailed)	.453	.672	.
		N	30	30	30

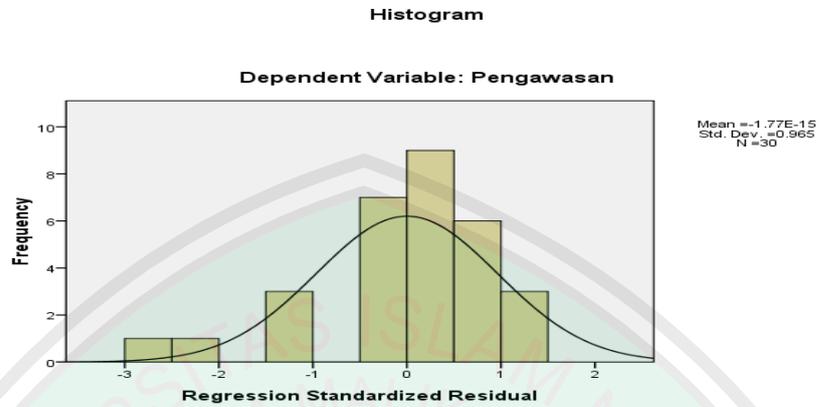
Sumber : Data diolah, 2015

Pengujian dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi atau disebut dengan korelasi *spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual*. Hasil dari uji heteroskedastisitas diatas nilai signifikan kedua variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4.1.4.3. Uji Normalitas

Cara yang akan dipakai dalam uji normalitas ini adalah menggunakan cara uji normalitas grafik histogram dan normal probability plots. Cara grafik histogram dalam menentukan suatu data berdistribusi normal atau tidak, cukup membandingkan antara data rill atau data nyata dengan garis kurva yang terbentuk. Jika data rill membentuk garis kurva cenderung tidak simetris terhadap mean (μ), maka dikatakan data distribusi tidak normal dan sebaliknya. Cara normal probability plot, membandingkan data rill dengan data distribusi normal secara komulatif. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill mengikuti garis diagonal.

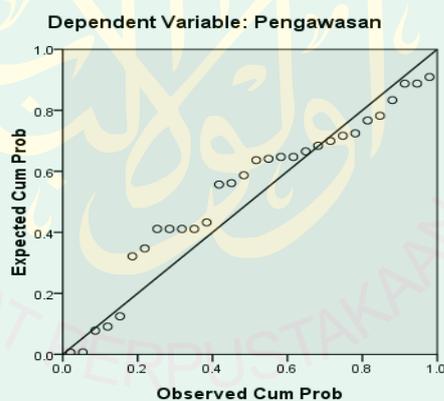
Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas Histogram



Sumber : Data diolah, 2015

Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas Normal Probability Plots

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data diolah, 2015

Dari hasil grafik histogram didapat garis kurva normal, berarti data yang diteliti diatas berdistribusi normal, demikian juga dari normal probability plots menunjukkan berdistribusi normal, karena garis (titik-titik) mengikuti garis diagonal.

4.1.4.4. Uji Autokorelasi

Persamaan yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi

Tabel 4.19
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.293 ^a

Sumber : Data diolah, 2015

Dari hasil olah data diatas, diketahui ujia asumsi klasik autokorelasi melalui nilai Durbin-Watson (DW) tests = 2,645 dan lebih besar dari 2 ($DW > 2$) maaka disimpulkan data diatas tidak terjadi autokorelasi.

4.1.5. Uji Regresi Berganda

Setelah pengujian asumsi klasik dilakukan dan dari hasil tersebut memenuhi kriteria uji asumsi klasik makan selanjutnya adalah melakukan uji regresi berganda dengan 3 variabel independen yaitu Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Pengawasan (Y) sebagai dependennya. Dari hasil uji regresi berganda untuk mempermudah membaca hasil akan digunakan persamaan model regresi. Persamaan regresi yang telah dirumuskan kemudian dengan bantuan program SPSS dilakukan pengelolaan data sehingga mendapatkan persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T hitung	Sig
Akuntabilitas (X_1)	0,054	0,210	0,257	0,799
Transparansi (X_2)	0,106	0,205	0,517	0,609
Konstanta	3,931			
R	0,101			
R_{Square}	0,010			
F	0,139			

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasar tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 3,931 + 0,054X_1 + 0,106X_2$$

Keterangan:

Y = Pengawasan

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

Berdasar persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Konstanta = 3,931

Hasil perhitungan diperoleh nilai konstanta sebesar 3,931 artinya bahwa jika akuntabilitas dan transparansi diasumsikan tidak ada maka pengawasan dapat dikatakan meningkat sebesar 3,931.

- b. Koefisien regresi variabel akuntabilitas = 0,054

Nilai konstan dari koefisien regresi (b_1) sebesar 0,54% dengan tanda positif, dapat dikatakan bahwa dengan peningkatan variabel akuntabilitas (X_1) akan berpengaruh terhadap variabel pengawasan (Y), yang artinya semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula pengawasan.

c. Koefisien regresi variabel transparansi = 0,106

Nilai konstan dari koefisien regresi (b_2) sebesar 10,6% dengan tanda positif, dapat dikatakan bahwa dengan peningkatan variabel transparansi (X_2) akan berpengaruh terhadap pengawasan (Y), yang artinya semakin baik transparansi maka akan semakin baik pula pengawasan.

Sedangkan untuk kontribusi R_{square} sebesar 0,010, hasil tersebut menjelaskan bahwa, sumbangan atau kontribusi dari variabel akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) terhadap pengawasan sebesar 1% dan sisanya sebesar 99% lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan atau penelitian ini. Selain itu, berdasarkan data pada tabel 4.19, juga diketahui bahwa nilai koefisien R, yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Pada penelitian ini didapatkan besarnya hubungan antara akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) terhadap pengawasan adalah sebesar 0,101 (10,1%) yang menunjukkan kurang adanya pengaruh atau hubungan yang kuat.

4.1.6. Uji Hipotesis

4.1.6.1. Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti secara bersama-sama variabel dependen mempunyai pengaruh terhadap variabel independen.

Berdasar uji statistik tersebut, penolakan hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata 0,05 (taraf kepercayaan 0,95) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada pengaruh yang simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada pengaruh yang simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.21
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.025	2	.012	.139	.871 ^a
	Residual	2.387	27	.088		
	Total	2.412	29			

Sumber : Data diolah, 2015

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan atau uji F seperti ditampilkan pada tabel di atas diperoleh F_{hitung} sebesar 0,139 dengan signifikansinya 0,871 lebih besar dari 0,05, maka model regresi dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengawasan.

Secara lebih rinci, nilai F hitung akan dibandingkan dengan F_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan pembilang atau df (k-1) = 1 (jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut atau df2 (n-k-1) = 27, diperoleh nilai F_{tabel} adalah 4,21. Dengan demikian, nilai F_{hitung} 0,139 lebih kecil dari nilai F_{tabel} (4,21). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) tidak

bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (pengawasan).

4.1.6.2. Uji T (T-test)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Untuk mengetahui variabel bebas manakah yang dominan atau paling berpengaruh diantara variabel yang lain. Dengan tingkat signifikansi 5 % maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.22
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.931	1.497		2.625	.014
	Akuntabilitas	.054	.210	.052	.257	.799
	Transparansi	.106	.205	.104	.517	.609

Sumber : Data diolah, 2015

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) yang menyebutkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengawasa pengelolaan keuangan daerah (APBD), dilihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,257 yang berarti lebih kecil dari t_{tabel} 2,052 dengan signifikansi 0,05 yang berarti lebih kecil dari 0,799. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa;

Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD).

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yang menyebutkan bahwa Transparansi berpengaruh negatif terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD), dilihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,517 yang berarti lebih kecil dari t_{tabel} 2,052 dengan signifikansi 0,05 yang berarti lebih kecil dari 0,609. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa; Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD).

4.2. Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f dan uji t dapat dilihat dalam tabel 4.22 dibawah ini:

Tabel 4.23
Ringkas Hasil Uji Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Pengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD)	Tidak berpengaruh
H ₂	Pengaruh transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD)	Tidak berpengaruh
H ₃	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi berpengaruh simultan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD)	Tidak berpengaruh

Sumber : Data diolah, 2015

4.2.1. Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Hasil uji hipotesis (uji t) yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas (X_1) terhadap pengawasan (Y), didapatkan hasil t_{hitung} (0,257) < t_{tabel} (2,052) atau Sig T > 5% (0,799 > 0,05). Hasilnya variabel akuntabilitas (X_1) tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan hasil dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliastuti (2013) yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan beda wilayah akan mempengaruhi setiap penilaian anggota DPRD oleh sebab itu antara hipotesis yang diambil berbeda dengan hasil penelitian yang di dapat. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penerapan akuntabilitas semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka akan semakin rendah tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD II Kabupaten Trenggalek.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena kebaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan

mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Santoso & Pambelum, 2008:15).

Menurut Santoso & Pambelum, (2008:19) Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktakiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

4.2.2. Mengetahui Pengaruh Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Hasil uji hipotesis (uji t) yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh transparansi (X_2) terhadap pengawasan (Y), didapatkan hasil t_{hitung} (0,517) < t_{tabel} (2,052) atau Sig T > 5% (0,609 > 0,05). Hasilnya variabel transparansi (X_2) tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Hasil ini menunjukkan tidak ada pengaruh transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) konsisten dengan penelitian Juliastuti (2013) yang menyatakan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD). Hal senada juga diungkapkan Wahyudi (2007) dalam penelitiannya yang dilakukan di wilayah Malang Raya bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya. Juliastuti (2013) dari hasil penelitian mengungkapkan, kombinasi kesesuaian transparansi kebijakan publik bukanlah merupakan kesesuaian terbaik. Ini berarti bahwa transparansi kebijakan publik tidak memberikan pengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan sebagai pengawasan keuangan daerah. Menurut Wahyudi (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak diterimanya hipotesisnya dikarenakan transparansi kebijakan publik di wilayah Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu masih dalam taraf retorika dan implementasinya masih dalam formalitas. Akses

terhadap kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria; (1) adanya pertanggungjawaban terbuka, (2) adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, (3) adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja (Auditya & Lismawati: 2013).

Menurut Auditya & Lismawati (2013) Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan

kepentingan masyarakat. Manajemen kinerja yang baik adalah merupakan titik awal dari transparansi, untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.



4.2.3. Mengetahui Pengaruh Pengawasan dan Transparansi Secara Simultan Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Di Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Hasil uji hipotesis simultan (uji f) yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengawasan (X_1) dan transparansi (X_2) secara simultan terhadap pengawasa (Y), didapatkan hasil $F_{hitung} 0,139 < F_{tabel} 4,21$ atau $Sig F > 5\%$ ($0,817 > 0,05$). Hasilnya akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dari hipotesis yang diturunkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengawasan. Hal yang menyebabkan akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh simultan disebabkan oleh pengaruh variabel lain yang lebih dominan terhadap dua variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan, hal ini diperkuat oleh uji R_{square} hanya sebesar 0,010 (1%) dan variabel lain mendominasi sebesar 99%. Penelitian ini juga diketahui besarnya hubungan antara akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) terhadap pengawasan adalah sebesar 0,101 yang menunjukkan kurang adanya pengaruh atau hubungan yang kuat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengamati tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek yang memiliki fungsi sebagai pengawasan secara lembaga terhadap Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dengan mengguakan metode survei. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka memperoleh hasil sebagai berikut;

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) memiliki hasil yang tidak signifikan, berarti dalam penelitian yang telah dilakukan tidak ada pengaruh antara akuntabilitas terhadap pengawasan pengelolaan keuangan secara parsial.
2. Pengaruh transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) memiliki hasil yang tidak signifikan, tidak adanya pengaruh transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD), maka semakin tinggi transparansi semakin rendah tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD.
3. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) memiliki hasil yang tidak signifikan, berarti secara bersama-sama akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

5.2.Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di DPRD II Kabupaten Trenggalek, untuk melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, memiliki keterbatasan antara lain:

- a. Variabel yang digunakan masih kurang, bisa dilihat dalam tabel 4.19 hasil uji regresi masih menunjukkan jika pengaruh dari variabel lain masih mendominasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan R_{square} sebesar 1% sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel dependen dan variabel indenpeden
- b. Sampel yang digunakan adalah seluruh anggota DPRD II Kabupaten Trenggalek yang berjumlah 45, diambil dengan menggunakan metode survei dan yang memberikan jawaban hanya 30 responden, bukan hanya anggota badan anggaran (banggar) yang menjadi responden sehingga beberapa annggota kurang memahami soal anggaran. Kurang luasnya objek penelitian juga mempengaruhi hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2012). *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
- Auditya, Lucy dan Lismawati, Husaini (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, Volume 3 Nomor 1. Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu. Hal 21-41
- Coryanata, Isma. (2007). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. Hal 18-19
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan BLU (Jilid 2)*. Kembangan: PT Macanan Jaya Cemerlang
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Syamsul. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi Keuangan*. (Jilid 1). Yogyakarta: Ekonesia
- Halim. (2002). *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Bawono, Icuk Rangga. (2011). *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keungan (Jilid 1)*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- <http://www.kemendagri.go.id>
- <http://www.trenggalekkab.go.id>
- <http://www.trenggalek.bps.go.id>
- Husen, La Ode. (2005). *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV Utomo
- Juliastuti, Ayu. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota Di Provinsi Sumatera Barat)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Revika Aditama
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1*. Mei 2006. Hal 2-4
- Mihradi, Muhammad K. (2011). *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Novatiani, Ait R. dan Lestari, N. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di DPRD Kota Bandung*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung
- Pengawasan Pasar. (2015). Diperoleh Tanggal, 10 Mei 2010. <https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomi-islam/>
- Rahmawati, Ayu A. (2013). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Santoso, Urip dan Pambelum, J. Yohanes. (2008) Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 4 Nomer 1*. FISIP-UNPAR. Hal 14-33
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” (Jilid 2, edisi revisi). Bandung: CV Mandar Maju
- Sulistoni G. (2003). *Fiqh Korupsi : Amanah Vs Kekuasaan, SOMASI*. Nusa Tenggara Barat
- Sunyoto, Dadang. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Tafsir Al-Quran. (2013). Tafsir Al-Quran, Surat Al-Anfal Ayat 26-27. Diperoleh Minggu, Tanggal, 07 Juli 2013, 05:37. http://indonesian.irib.ir/islam/al-quran/item/66087-Tafsir_Al-Quran,_Surat_Al-Anfal_Ayat_26-29
- UU Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara
- UU Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju
- Wahyudi, Isa. (2007). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Malang Corruption Watch (MCW)
- Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir. (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. Hal 21-23

LAMPIRAN I

Kuesioner Untuk DPRD II Kab. Trenggalek

Data Responden

Nama : (Nama boleh tidak diisi)

Umur :

Jenis Kelamin : () Laki-laki, () Perempuan

Fraksi :

Komisi :

Pendidikan :

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

SS : Sangat Setuju KS : Kurang Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

S : Setuju TS : Tidak Setuju

Akuntabilitas

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang ditetapkan					
2	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasi yaitu Perda dan juga berupa petunjuk pelaksanaan					
3	Pengalokasian dana anggaran daerah dinyatakan dalam Peraturan Daerah					
4	Proses Penyusunan APBD melibatkan semua elemen-elemen masyarakat					
5	Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku					
6	Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD					
7	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsi efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.					

8	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisien bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) menghasilkan output maksimal (berdaya guna)					
9	Pelaksanaan program-program anggaran (APBD) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (publik)					
10	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik					
11	DPRD bersama pemerintah daerah melakukan penjaringan aspirai masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat					
12	Masyarakat (publik) dilibatkan dalam perancangan kebijakan-kebijakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan					
13	Pelaksanaan kebijakan tersebut dipertanggungjawabkan pemerintah daerah pada DPRD					

Transparansi

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Menurut anggota Dewan, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi					
2	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
3	Selama ini menurut anggota dewan masyarakat mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran					
4	Masyarakat dapat mengetahui proses-proses pembuatan kebijakan keuangan daerah					
5	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi anggota Dewan dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					
6	Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan dilakukan melalui media massa, maupun media komunikasi personal					
7	Akses publik pada informasi atas suatu keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan rakyat					
8	Menurut anggota dewan kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat					

Pengawasan

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD					
2	Menurut anggota dewan penetapan APBD lebih perpihak pada kepentingan publik					
3	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD					
4	Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD					
5	Anggota dewan merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi					
6	Pengesahan APBD telah menunjukkan azas transparansi					
7	Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah anggota dewan berperan aktif mengawasi setiap kebijakan pemerintah daerah					
8	Anggota dewan bersikap kritis dalam setiap kewenangan pemerintah yang menyimpang dalam tatanan rancangan APBD					
9	Setiap anggota dewan menggunakan haknya dalam menjalankan fungsi pengawasan					
10	DPRD berperan aktif menolak LPJ bupati tahunan jika pemerintah daerah menyalah gunakan wewenang					
11	Penolakan terhadap LPJ Bupati anggota dewan lakukan jika terjadi kepentingan konspirasi politik					
12	Anggota dewan aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan					

item_15	Pearson Correlation	.177	1	.426*	.148	.342	.210	-.041	.309	.549**
	Sig. (2-tailed)	.350		.019	.435	.064	.266	.829	.097	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_16	Pearson Correlation	.113	.426*	1	.158	.302	.170	.324	.230	.592**
	Sig. (2-tailed)	.552	.019		.405	.104	.369	.080	.221	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_17	Pearson Correlation	-.131	.148	.158	1	.235	.404*	.487**	-.171	.567**
	Sig. (2-tailed)	.491	.435	.405		.211	.027	.006	.365	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_18	Pearson Correlation	.311	.342	.302	.235	1	.509**	-.032	.257	.644**
	Sig. (2-tailed)	.094	.064	.104	.211		.004	.866	.171	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_19	Pearson Correlation	.119	.210	.170	.404*	.509**	1	.110	.155	.636**
	Sig. (2-tailed)	.532	.266	.369	.027	.004		.562	.412	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_20	Pearson Correlation	.058	-.041	.324	.487**	-.032	.110	1	.076	.498**
	Sig. (2-tailed)	.760	.829	.080	.006	.866	.562		.689	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_21	Pearson Correlation	.582**	.309	.230	-.171	.257	.155	.076	1	.486**
	Sig. (2-tailed)	.001	.097	.221	.365	.171	.412	.689		.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Transparansi	Pearson Correlation	.433*	.549**	.592**	.567**	.644**	.636**	.498**	.486**	1
	Sig. (2-tailed)	.017	.002	.001	.001	.000	.000	.005	.007	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

item_30	Pearson Correlation	.317	-.166	.446*	.279	-.050	.145	.404*	.475**	1	.583**	-.217	.361*	.609**
	Sig. (2-tailed)	.088	.381	.014	.135	.793	.446	.027	.008		.001	.250	.050	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_31	Pearson Correlation	.425*	-.093	.455*	.200	.134	.022	.241	.071	.583**	1	.081	.485**	.653**
	Sig. (2-tailed)	.019	.626	.011	.290	.480	.910	.200	.710	.001		.671	.007	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_32	Pearson Correlation	.044	-.390*	.035	.526**	.249	.454*	-.112	-.219	-.217	.081	1	.200	.388*
	Sig. (2-tailed)	.818	.033	.853	.003	.184	.012	.556	.244	.250	.671		.289	.034
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_33	Pearson Correlation	.351	-.092	.388*	.031	.083	.027	.447*	.088	.361*	.485**	.200	1	.573**
	Sig. (2-tailed)	.057	.630	.034	.871	.663	.889	.013	.645	.050	.007	.289		.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengawasan	Pearson Correlation	.577**	-.135	.707**	.506**	.345	.468**	.484**	.355	.609**	.653**	.388*	.573**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.476	.000	.004	.062	.009	.007	.054	.000	.000	.034	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

item_24Y	Pearson Correlation	.479**	1	.234	.287	.315	.446*	.455*	.035	.388*	.660**
	Sig. (2-tailed)	.007		.212	.124	.090	.014	.011	.853	.034	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_25Y	Pearson Correlation	.109	.234	1	.342	-.035	.279	.200	.526**	.031	.581**
	Sig. (2-tailed)	.568	.212		.064	.856	.135	.290	.003	.871	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_27Y	Pearson Correlation	.129	.287	.342	1	.089	.145	.022	.454*	.027	.538**
	Sig. (2-tailed)	.498	.124	.064		.638	.446	.910	.012	.889	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_28Y	Pearson Correlation	.294	.315	-.035	.089	1	.404*	.241	-.112	.447*	.444*
	Sig. (2-tailed)	.115	.090	.856	.638		.027	.200	.556	.013	.014
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_30Y	Pearson Correlation	.317	.446*	.279	.145	.404*	1	.583**	-.217	.361*	.622**
	Sig. (2-tailed)	.088	.014	.135	.446	.027		.001	.250	.050	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_31Y	Pearson Correlation	.425*	.455*	.200	.022	.241	.583**	1	.081	.485**	.665**
	Sig. (2-tailed)	.019	.011	.290	.910	.200	.001		.671	.007	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_32Y	Pearson Correlation	.044	.035	.526**	.454*	-.112	-.217	.081	1	.200	.479**
	Sig. (2-tailed)	.818	.853	.003	.012	.556	.250	.671		.289	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_33Y	Pearson Correlation	.351	.388*	.031	.027	.447*	.361*	.485**	.200	1	.590**
	Sig. (2-tailed)	.057	.034	.871	.889	.013	.050	.007	.289		.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PengawasanY	Pearson Correlation	.541**	.660**	.581**	.538**	.444*	.622**	.665**	.479**	.590**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.001	.002	.014	.000	.000	.007	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

item_11Xx	Pearson Correlation	.161	.206	.524**	.186	.285	.175	.365*	.239	1	.111	.463**	.627**
	Sig. (2-tailed)	.394	.274	.003	.324	.127	.355	.047	.204		.559	.010	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_12Xx	Pearson Correlation	.279	.270	.270	.021	-.285	.408*	.111	-.130	.111	1	.617**	.394*
	Sig. (2-tailed)	.136	.149	.149	.913	.127	.025	.559	.493	.559		.000	.031
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
item_13Xx	Pearson Correlation	.048	.000	.463**	-.302	.000	.614**	.154	-.246	.463**	.617**	1	.402*
	Sig. (2-tailed)	.803	1.000	.010	.105	1.000	.000	.416	.190	.010	.000		.028
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
AkuntabilitasXx	Pearson Correlation	.418*	.457*	.700**	.568**	.497**	.473**	.578**	.552**	.627**	.394*	.402*	1
	Sig. (2-tailed)	.022	.011	.000	.001	.005	.008	.001	.002	.000	.031	.028	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas Akuntabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	16

Uji Reliabilitas Transparansi

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	9

Uji Reliabilitas Pengawasan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.732	10

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	AkuntabilitasXx	.902	1.108
	TransparansiX	.902	1.108

a. Dependent Variable: PengawasanY

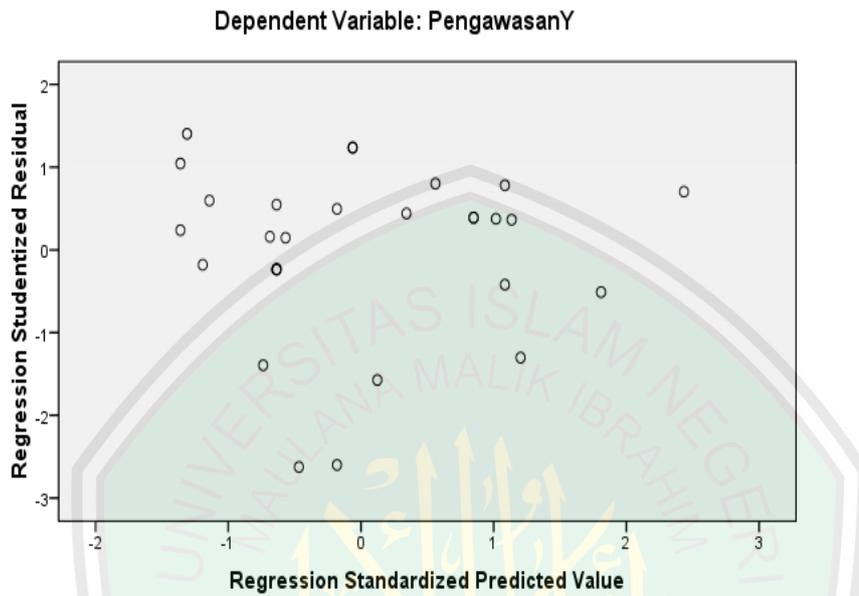
Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	AkuntabilitasXx	TransparansiX
1	1	2.994	1.000	.00	.00	.00
	2	.005	24.440	.00	.32	.36
	3	.001	58.469	1.00	.67	.64

a. Dependent Variable: PengawasanY

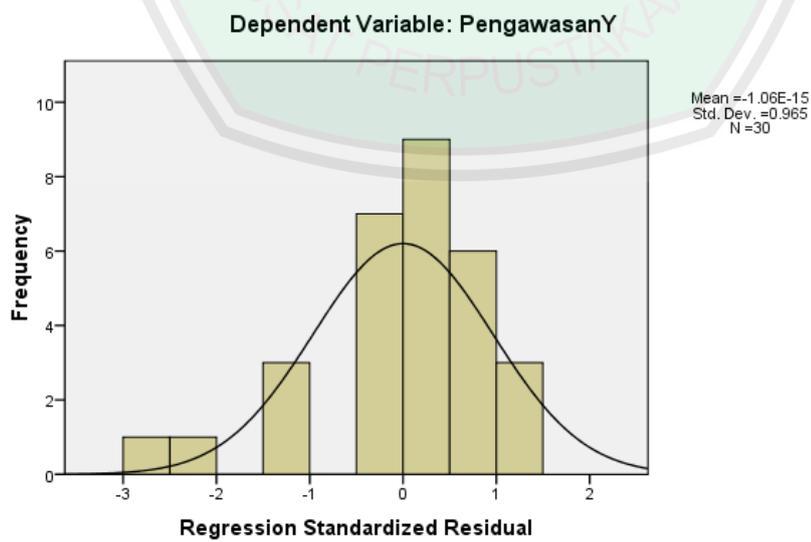
Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

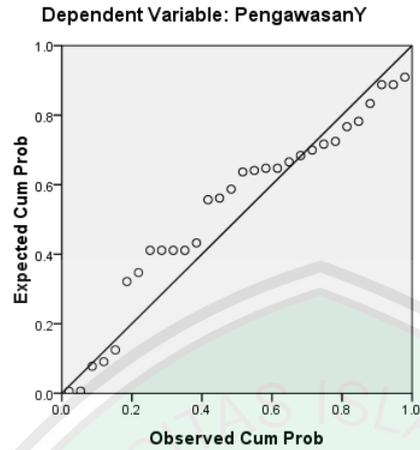


Uji Normalitas

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2.293 ^a

a. Predictors: (Constant), TransparansiX, AkuntabilitasXx

b. Dependent Variable: PengawasanY

Uji Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Transparansi, Akuntabilitas ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pengawasan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.101 ^a	.010	-.063	.29736

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengawasan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.025	2	.012	.139	.871 ^a
	Residual	2.387	27	.088		
	Total	2.412	29			

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Pengawasan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.931	1.497		2.625	.014
	Akuntabilitas	.054	.210	.052	.257	.799
	Transparansi	.106	.205	.104	.517	.609

a. Dependent Variable: Pengawasan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4,6012	4,7115	4,6407	,02907	30
Std. Predicted Value	-1.361	2.433	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.057	.158	.091	.024	30
Adjusted Predicted Value	4,5535	4,7708	4,6447	,04835	30
Residual	-,74660	,39735	-4,95668E-16	,28692	30
Std. Residual	-2.511	1.336	.000	.965	30
Stud. Residual	-2.624	1.403	-.006	1.019	30
Deleted Residual	-,82473	,43823	-,00397	,32032	30
Stud. Deleted Residual	-2.983	1.430	-.033	1.088	30
Mahal. Distance	.082	7.207	1.933	1.617	30
Cook's Distance	.000	.269	.040	.067	30
Centered Leverage Value	.003	.249	.067	.056	30

a. Dependent Variable: Pengawasan

1	2	3	4
IV.	FRAKSI PERSATUAN INDONESIA SEJAHTERA 1. MOH. NUR EFENDI, SH, M. Hum 2. ALWI BURHANUDIN, ST 3. TARKIYAT 4. AGUS CAHYONO 5. SUBADIANTO 6. H. DASIRAN, S.Pd 7. SUGENG, S.Pd 8. DWI UTOMO 9. JUMAKIR, S.Pd 10. IMAM BASUKI, S.Sos	Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Bendahara merangkap anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	✓
V.	FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 1. SUKADJI, Bsc, Spd 2. Drs. H. SAMSURI, M.Si 3. H.J. ARIK SRI WAHYUNI, SE, MM 4. SUNARKUN, ST 5. NURWAHYUDI, SPd	Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Bendahara merangkap anggota Anggota Anggota	

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

WAKIL KETUA,

KETUA,

GUSWANTO

H. SAMSUL ANAM

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negweri Republik Indonesia

2. Sdr. Gubernur Jawa Timur

3. Sdr. Bupati Trenggalek ;

4. Sdr. Segenap Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRD Kab. Trenggalek.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	ALWI BURHANUDIN, ST.	Ketua merangkap anggota
2.	NURHADI	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	IM. MUSIRIN, SE.	Anggota
4.	SUPARMIN SOEJONO, S.Pd.	Anggota
5.	SUNARKUN, ST	Anggota
6.	Drs. ABU MANSUR, MIS.	Sekretaris bukan Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA ,

SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Bupati Trenggalek.
3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek.
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek.
5. Sdr. Segenap Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kab.
Trenggalek ybs.

BAPOR 107

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	NAMA	JABATAN
1.	MOH. HUSNI TAHIR H., SE., SH., MH	Ketua merangkap anggota
2.	SUBADIANTO	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Drs. HARI LANGGENG W	Anggota
4.	IM. MUSIRIN, SE	Anggota
5.	Drs. SAMSURI, M.Si.	Anggota
6.	IMAM MUSLICHUDIN, SE.	Anggota
7.	MUGIANTO, SP.d., MH.	Anggota
8.	Drs. SUKARODIN, M.Ag.	Anggota
9.	ZAENAL FANANI, ST., M.MT.	Anggota
10.	TARKIYAT	Anggota
11.	DWI UTOMO	Anggota
12.	Drs. ABU MANSUR, MIS.	Sekretaris bukan anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

KETUA ,

SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur

2. Sdr. Bupati Trenggalek.

3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek.

4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek.

5. Sdr. Segenap Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Kab.

1

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	NAMA	JABATAN	PEMBIDANGAN
1.	Drs. HARI LANGGENG W ✓	Ketua	BIDANG PEMERINTAHAN, meliputi : 1. Pemerintahan; 2. Ketertiban; 3. Kependudukan 4. Informasi Komunikasi / Pers; 5. Hukum dan Perundang- undangan; 6. Kerja sama 7. Kepegawaian / Aparatur; 8. Perijinan; 9. Sosial Politik; 10. Organisasi masyarakat; 11. Pertanahan; 12. Inspektorat.
2.	Drs. SAMSURI, M.Si. ✓	Wakil Ketua	
3.	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT. ✓	Sekretaris	
4.	IM. MUSIRIN, SE.	Anggota	
5.	MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SE., SH., MH ✓	Anggota	
6.	MUTRIMAN ✗	Anggota	
7.	ZAINUDIN	Anggota	
8.	SUKRI ✗	Anggota	
9.	DWI UTOMO	Anggota	
10.	SUBADIANTO	Anggota	

SAMSURI
PANDU
REZA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

KETUA ,

SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Bupati Trenggalek.
3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN	PEMBIDANGAN
1.	SUKADJI, BSc. S.Pd,	Ketua	BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN,
2.	BAMBANG SUTOPO, SE.	Wakil Ketua	meliputi :
3.	IMAM MUSLICHUDIN, SE.	Sekretaris	1. Perdagangan;
4.	PRANOTO	Anggota	2. Perindustrian;
5.	NURWAHYUDI, S.Pd.	Anggota	3. Pertanian;
6.	SUMARNO	Anggota	4. Kelautan dan Perikanan;
7.	Drs. M. HADI	Anggota	5. Peternakan;
8.	SITI ALFIYAH, ST.	Anggota	6. Perkebunan;
9.	IMAM BASUKI	Anggota	7. Kehutanan;
10.	DASIRAN ALWI B. ST	Anggota	8. Pengadaan Pangan;
			9. Logistik;
			10. UMKM dan Koperasi;
			11. Pariwisata;
			12. Asset dan Keuangan Daerah;
			13. Retribusi dan Perpajakan;
			14. Perusahaan Daerah;
			15. Perusahaan Patungan;
			16. Penanaman Modal;
			17. Pertambangan / Energi.

MUDIORO
ADES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA ,

SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur

2. Sdr. Bupati Trenggalek.

3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN	PEMBIDANGAN
1.	Drs. SUKARODIN, M.Ag.	Ketua	BIDANG PEMBANGUNAN, meliputi : 1. Perencanaan Pembangunan; 2. Pekerjaan Umum; 3. Tata ruang; 4. Pertamanan; 5. Kebersihan; 6. Perhubungan. 7. Pemukiman / Perumahan & Lingkungan Hidup; 8. Pemberdayaan Masyarakat;
2.	PUGUH PURNOMO, SE.	Wakil Ketua	
3.	ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM.	Sekretaris	
4.	WAHYU DIANTO	Anggota	
5.	ARIFIN	Anggota	
6.	SUSILO DARMONO	Anggota	
7.	SUPRAMONO	Anggota	
8.	Drs. SATAM	Anggota	
9.	MOH. NUR EFFENDI, SH.	Anggota	
10.	TARKIYAT	Anggota	
11.	SUGENG, S.Pd.	Anggota	

ADI
DARISAP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA ,

SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur

2. Sdr. Bupati Trenggalek.

3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN	PEMBIDANGAN
1.	MUGIANTO, S.Pd., MH.	Ketua	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, meliputi :
2.	H. SUPARMIN SUJONO, S.Pd.	Wakil Ketua	1. Ketenagakerjaan;
3.	PENNY SUGIHARTI, S.Sos.	Sekretaris	2. Pendidikan;
4.	SITI NGAWATI	Anggota	3. Kebudayaan;
5.	SUNARKUN, ST	Anggota	4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6.	DJUMANI, BSc.	Anggota	5. Kepemudaan dan Olahraga;
7.	NURHADI	Anggota	6. Perpustakaan;
8.	DJUMIATI, S.Pd.	Anggota	7. Agama;
9.	ALWI BURHANUDIN, ST. DASRAN, S.Pd.	Anggota	8. Sosial;
10.	JUMAKIR	Anggota	9. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
			10. Peranan, Wanita dan Perlindungan Anak;
			11. Transmigrasi;
			12. Penanggulangan Bencana Alam.

MERU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA ,

SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur

2. Sdr. Bupati Trenggalék.

3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalék.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN
1.	SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.	Ketua merangkap anggota
2.	GUSWANTO	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	LAMUJI, S.Pd., M.Hum.	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	AGUS CAHYONO	Wakil Ketua merangkap anggota
5.	PENNY SUGIHARTI, S.Sps.	Anggota
6.	PRANOTO	Anggota
7.	WAHYU DIANTO	Anggota
8.	SUKADJI, BSc., S.Pd.	Anggota
9.	ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM.	Anggota
10.	SUNARKUN, ST.	Anggota
11.	MUGIANTO, S.Pd, MH.	Anggota
12.	DJUMANI, B.Sc.	Anggota
13.	SUMARNO	Anggota
14.	MUTRIMAN	Anggota
15.	SUPRAMONO.	Anggota
16.	Drs. SUKARODIN, M.Ag.	Anggota
17.	Drs. M. HADI	Anggota
18.	Drs. SATAM	Anggota
19.	MOH. NUR EFFENDI	Anggota
20.	ALWI BURHANUDIN	Anggota
21.	IMAM BASUKI	Anggota
22.	SUGENG	Anggota
23.	Drs. ABU MANSUR, MIS	Sekretaris bukan Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA ,

SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Bupati Trenggalek.
3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek.
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek.
5. Sdr. Segenap Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Trenggalek ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : OKTOBER 2014.

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA	JABATAN
1.	SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum. ✓	Ketua merangkap anggota
2.	GUSWANTO ✓	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	LAMUJI, S.Pd., M.Hum ✓	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	AGUS CAHYONO	Wakil Ketua merangkap anggota
5. ✓	BAMBANG SUTOPO, SE.	Anggota
6. ✓	ARIFIN ✓	Anggota
7. ✓	SITI NGAWATI	Anggota
8. ✓	Drs. SAMSURI, M.Si.	Anggota
9. ✓	ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM.	Anggota
10. ✓	NUR WAHYUDI, S.Pd. ✓	Anggota
11. ✓	ZAINUDIN ✓	Anggota
12.	MOH. HUSNI TAHIR H, SE., SH., ✓ MH.	Anggota
13. ✓	PUGUH PURNOMO, SE ✓	Anggota
14. ✓	IMAM MUSLICHUDIN, SE. ✓	Anggota
15. ✓	SUSILO DARMONO ✓	Anggota
16. ✓	DJUMIATI, S.Pd. ✓	Anggota
17. ✓	SITI ALFIYAH, ST. ✓	Anggota
18. ✓	SUKRI ✓	Anggota
19. ✓	JUMAKIR	Anggota
20. ✓	DW UTOMO ✓	Anggota
21. ✓	DASIRAN	Anggota
22. ✓	SUGENG	Anggota
23.	Drs. ABU MANSUR, MIS.	Sekretaris bukan Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA ,

SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Bupati Trenggalek
3. Sdr. Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. A. Yani No. 4 Telp. (0355) 791354
TRENGGALEK 66316

Trenggalek, 28 Agustus 2015

Nomor : 070/ 2968/406.019/2015
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Melakukan Penelitian**

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

di-
MALANG

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.3.5/TL.00/11/979/2015 tanggal 4 April 2015 perihal : Ijin Penelitian Skripsi dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : Oktana Yudha Sakti
Alamat : RT. 004 RW. 002 Ds. Banaran Kec. Tugu
Kab. Trenggalek
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Instansi/Civitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah *melakukan Penelitian/Survey/Research* di Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek mulai tanggal 12 Agustus s/d 30 September 2015.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. ABU MANSUR, MIS
Bembina Utama Muda
NIP. 195906081984031006



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
TRENGGALEK Kode Pos. 66316

Trenggalek, 12 Agustus 2015

Nomor : 070/189 /406.043/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua DPRD
Kabupaten Trenggalek
di

TRENGGALEK

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3.5/TL.00/11/979/2015, tanggal 4 April 2015 perihal Ijin Penelitian Skripsi, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Trenggalek untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TRENGGALEK

Kasi P. Ideologi dan Poldagri



MARYANI, S.Sos.

Penata Tk I

NIP. 19690410 199302 1 002

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Trenggalek
(sebagai laporan);
2. Sekretaris DPRD Kab.
Trenggalek;
3. Dekan Fak. Ekonomi UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang;
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547
TRENGGALEK Kode Pos. 66316

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/189 /406.043/2015

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. bahwa sesuai surat dari Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor; Un.3.5/TL.00/11/979/2015 tanggal 4 April 2015 perihal Ijin Penelitian Skripsi;
c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b dan sesuai permohonan dari yang bersangkutan serta berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4,5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Bupati Trenggalek, memberikan rekomendasi/perpanjangan kepada:

- a. Nama : OKTANA YUDHA SAKTI
b. Alamat : RT. 004 RW. 002 Ds. Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Civitas/
Organisasi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan penelitian/survey/research dengan:

- a. Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek
b. Bidang Penelitian : Ekonomi
c. Tujuan : Penelitian guna penyusunan Skripsi
d. Status Penelitian : Swadaya
e. Penanggung Jawab : NANIK WAHYUNI, SE., M.Si.,Ak.
f. Anggota : -
g. Tanggal (Waktu) : 12 Agustus s/d 30 September 2015
h. Tempat/Lokasi : Sekretariat DPRD Kab. Trenggalek

- Dengan Ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Trenggalek melalui Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Trenggalek, 12 Agustus 2015

a.n. BUPATI TRENGGALEK
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TRENGGALEK

Kas. Bina Teknologi dan Poldagri



MARYANI, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19690410 199302 1 002

Tembusan:

1. Bapak Bupati Trenggalek (sebagai laporan);
2. Sekretaris DPRD Kab. Trenggalek;
3. Dekan Fak. Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN V

BUKTI KONSULTASI

Nama : Oktana Yudha Sakti
NIM/Jurusan : 11520032
Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE.,MSA.,Ak.,CA
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten
Trenggalek

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	23 Februari 2015	Pengajuan Outline	1
2	06 April 2015	Proposal	2
3	18 Mei 2015	Revisi Proposal	3
4	12 Juni 2015	Acc Proposal	4
5	01 Juli 2015	Seminar Proposal	5
6	16 September 2015	Bab IV	6
7	06 Oktober 2015	Bab I, II, III, IV, dan V	7
8	19 Oktober 2015	Revisi Skripsi	8
9	26 Oktober 2015	Revisi Skripsi	9
10	02 November 2015	ACC Skripsi	10

Malang, 02 Nopember 2015
Mengetui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Nanik Wahyuni, SE.,MSi.,Ak.,CA
NIP 19720322 200801 2 005

LAMPIRAN V

BUKTI KONSULTASI

Nama : Oktana Yudha Sakti
NIM/Jurusan : 11520032
Pembimbing : Dwi Sulistiani, SE.,MSA.,Ak.,CA
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengawasan
Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten
Trenggalek

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	23 Februari 2015	Pengajuan Outline	1 
2	06 April 2015	Proposal	2 
3	18 Mei 2015	Revisi Proposal	3 
4	12 Juni 2015	Acc Proposal	4 
5	01 Juli 2015	Seminar Proposal	5 
6	16 September 2015	Bab IV	6 
7	06 Oktober 2015	Bab I, II, III, IV, dan V	7 
8	19 Oktober 2015	Revisi Skripsi	8 
9	26 Oktober 2015	Revisi Skripsi	9 
10	02 November 2015	ACC Skripsi	10 

Malang, 02 Nopember 2015

Mengetui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Nandik Wahyuni, SE.,MSi.,Ak.,CA
NIP 19720322 200801 2 005

LAMPIRAN VI

BIOGRAFI

Oktana Yudha S. Lahir pada tanggal 12 oktober 1992 di Desa Banaran, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Penulis lahir dari orang tua Sutarto dan Kasiati sebagai anak pertama dalam keluarga. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Banaran, melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Tugu, dan sekolah menengah atas di SMAN 1 Karang di Trenggalek, hingga akhirnya menempuh masa kuliah di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

